

**BENTUK PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA
DERMAJI KECAMATAN LUMBIR
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)**

Oleh:

**FADLURRAHMAN AZMI AMIRUDIN
NIM : 1522104019**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
ISLAM
JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Fadhlurrahman ‘Azmi Amirudin
NIM : 1522104019
Jenjang : S1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal- hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**BENTUK PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

yang disusun oleh Saudara: **Fadhurrahman 'Azmi Amirudin**, NIM1522103017.
1522104019, Prodi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan **Pengembangan
Masyarakat**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah
diujikan pada tanggal: **14 Oktober 2019**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,

Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19810117 200801 2 010

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Nurma Aji Ridwan, M.Ag.
NIP 19740109 200501 1 003

Penguji Utama,

Asyhabuddin, S.S, M.A
NIP 19750206 200112 1 001

IAIN PURWOKERTO

Mengetahui,

Dekan,



Abdul Basit, M.Ag.

NIP 19811219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

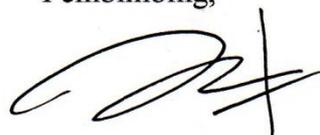
Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin
NIM : 1522104019
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Oktober 2019
Pembimbing,



Nur Azizah, M.Si.
NIP.198101172008012010

Motto

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'"

(HR. Thabrani dan Daruquthni).



PERSEMBAHAN

Puji syukur tersampaikan kepada tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmatnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat pendidikan yang berjenjang S1. Sholawat salam dihantarkan kepada utusan-Nya “*Allohumma sholli’ala sayyidina Muhammad*”, semoga kita semua mendapat pertolongannya kelak di hari pembalasan.

Ribuan kasih yang diberikan kepada anaknya telah mengiringi perjalanannya, terimakasih ayah tergarang pak Arlam alias Abdurrahman dan ibuku tersayang Nur Rokhmah, semoga kebaikan, kebahagiaan, cinta dan doa yang diberikan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih atas pengorbanannya untukku selama ini.

Abah Yai Muhammad Dzukhroni, Abah Yai Labis Shoddiq Suhaimi, Abah Yai Mughni Labib kalian lah orang tuaku setelah mereka. Terimakasih atas barokah yang dititipkan-Nya melalui kalian, semoga kalian menjadi kekasih Nya. Mahkota duniaku Mba Aulia Wisda Nurfitriana, dek Aisar Imro’ah Tabah Nisfi Ramadhani, kalian wanita hebat yang mampu mendampingiku selama ini, terimakasih. Semoga Tuhan Alloh Swt memberikan tahta sholihah kepada kalian.

Keluarga Bani Arsameja, Bani Masykuri, Bani Dipasemita dan Bani Martaleksana, *maturnembah nuwun sanget, mugl Gusti Alloh paring kesembadan panyuwunanipun. Amin.*

Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Fadhlurrahman ‘Azmi Amirudin

NIM: 1522104019

ABSTRAK

Pemerintah Desa merupakan pemegang kebijakan ditingkat Desa, kedudukan dan kewenangan Desa menjadi alasan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa. Pelayanan Sosial atau *social service* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ataupun program tencanakan untuk menjawab suatu masalah sosial di masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji merupakan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dermaji.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan strategi pelayanan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan lembaga yang terlibat dalam proses pelayanan sosial Desa Dermaji. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas melaksanakan Pelayanan Sosial di bidang pelayanan perumahan, meliputi; pengadaan air bersih dan renovasi rumah tidak layak huni milik warga. Kemudian bidang pelayanan kesehatan, meliputi; pendidikan anak usia dini, Perpustakaan Desa “jagad aksara” dan museum Desa “Naladipa”. Dan di bidang pelayanan kesehatan, meliputi; cek kesehatan, pengobatan, sosialisasi melalui PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) dan posyandu. Perencanaan yang matang, melibatkan masyarakat dan kerjasama dari berbagai pihak, pelayanan sosial tepat sasaran terealisasikan.

Kata kunci: Pelayanan Sosial dan Pemerintah Desa

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhannahu wata'ala*, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat dan nikmat sempat, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat Salam dihaturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammas *Sholallohu'alaihi wa sallam*, merupakan nabi akhir yang kita nanti- nantikan *syafaat* dan pertolongannya di hari pembalasan.

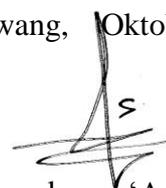
Seiring dengan ucapan syukur penulis sadar bahwa dalam proses penelitian ini dibantu berbagai pihak, baik bantuan yang bersifat dukungan moral, bimbingan, materil dan sebagainya. Oleh karena itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Prof. Dr. Abdul Basith, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Agus Sriyanto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. Sangidun, M.Si., selaku Penasehat Akademik Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2015.
8. Nur Azizah, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
9. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Dakwah
10. Segenap dosen dan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
11. Segenap staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
12. Bayu Setyo Nugroho, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Desa Dermaji tempat penelitian
13. Harry Haryono Caryono, A.Md., selaku Sekertaris Desa Dermaji
14. Bapak H.Arlam Abdurrohman dan Nur Rokhmah S.Ag selaku kedua orang tua penulis.
15. Aulia Wisda Nur Fitriana S.Pd dan Aisar Imro'ah Tabah Nisfi Ramadhani selaku kaka kandung dan adik kandung dari penulis.

Kepada rekan, sahabat dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas setiap bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah berkenan membalas kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap bahwa semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin ya Rabbal, Alamin.

Jatilawang, 10 Oktober 2019



Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin
NIM, 1522104019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
PERNYATAAN KEASLIAN-----	ii
PENGESAHAN-----	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING-----	iv
MOTTO -----	v
PERSEMBAHAN -----	vi
ABSTRAK-----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	x
DAFTAR LAMPIRAN-----	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang-----	1
B. Definisi Operasional-----	8
C. Rumusan Masalah-----	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian -----	10
E. Kajian Pustaka-----	12
F. Sistematika Penulisan -----	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pelayanan Sosial -----	16
1. Pengertian Pelayanan Sosial -----	16
2. Strategi Pelayanan Sosial-----	18
3. Bidang Pelayanan Sosial-----	20

4. Fungsi dan Tujuan Pelayanan Sosial -----	26
B. Pemerintah Desa -----	28
1. Pengertian Pemerintah Desa -----	28
2. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Desa-----	29
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -----	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian -----	33
B. Tempat Dan Waktu Penelitian -----	34
C. Subyek dan Obyek Penelitian -----	34
D. Sumber Data -----	35
E. Teknik Pengumpulan Data-----	36
F. Analisis Data-----	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas -----	40
1. Sejarah Desa Dermaji -----	40
2. Letak Wilayah Desa Dermaji-----	41
3. Kependudukan Desa Dermaji -----	41
4. Struktur Kepemerintahan Desa Dermaji -----	43
5. Lembaga- lembaga di Desa Dermaji-----	43
6. Prestasi Desa Dermaji-----	43
B. Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji-----	45
1. Pelaksanaan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji	46

2. Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji -----	49
C. Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas -----	57
1. Karakteristik Pelayanan Sosial Pemerintah Desa-----	57
2. Kebijakan Pemerintah Desa dan Pelayanan Sosial-----	58
3. Strategi Pelayanan Sosial Pemerintah Desa -----	60
4. Fungsi Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat-----	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan-----	66
B. Saran-----	67

DAFTAR PUSTAKA

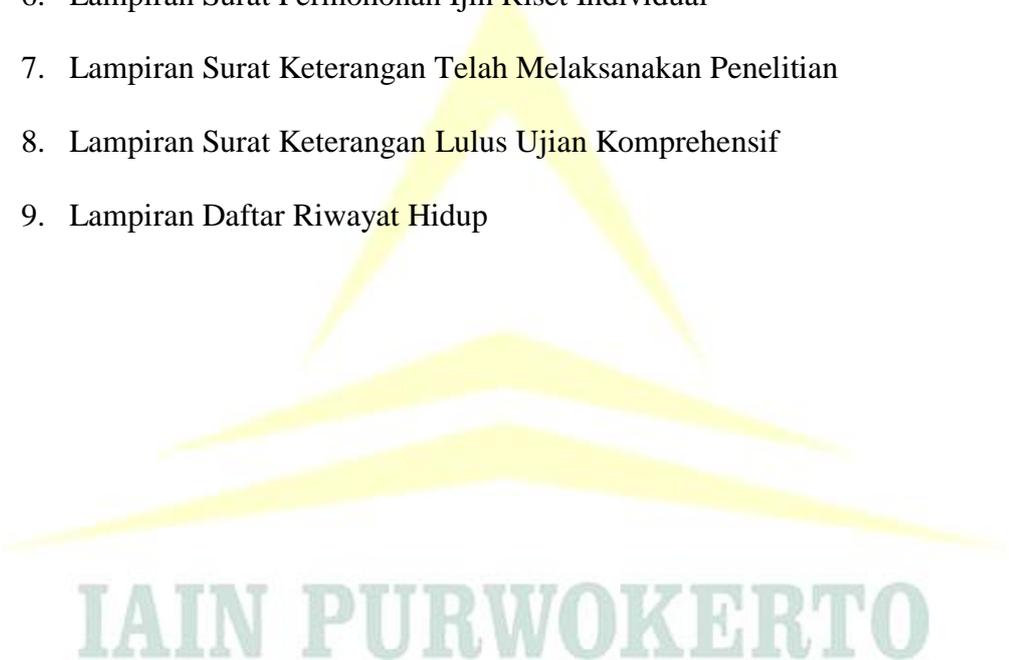
LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Hasil Wawancara
3. Lampiran Surat Keterangan Wawancara
4. Lampiran Dokumentasi
5. Lampiran Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
6. Lampiran Surat Permohonan Ijin Riset Individual
7. Lampiran Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
8. Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
9. Lampiran Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai *penyakit sosial* murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, para sosiolog mendefinisikan patologi sosial sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.¹ Dalam hal ini peneliti mengaitkannya dengan penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan subjek dari patologi sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara

¹ Kartini, kartono, *Patologi Sosial*, (pt raja grafindo persada, Jakarta : 2003) Hlm. 1

mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.² Perlunya tindakan dari diri seseorang baik kelompok maupun personal itu sendiri, seperti pemerintahan, lembaga ataupun seorang pekerja sosial.

Profesi pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang diakui secara internasional dan mempunyai jaringan organisasi praktik dan pendidikan internasional. Di Indonesia, profesi ini sering dibingungkan dengan volunterisme, par-profesional, dan pegawai negeri. Profesi pekerjaan sosial adalah yang pertama dalam pelayanan manusia yang memberikan fokus pada manusia-dalam-lingkungan sebagai suatu paradigma dalam melakukan asesmen dan perubahan.³

Dalam tugasnya pekerja sosial mampu mengembangkan dan mengimplementasikan rencana penanganan pada kelompok dan ataupun individu yang mengalami gangguan. Juliet Cassuto Rothman, kontrak adalah kesepakatan diantara dua pihak yang mendefinisikan dan menggambarkan hakikat relasi diantara mereka, termasuk tanggungjawab masing masing dan hukuman yang mungkin diperoleh apabila salah satu pihak gagal mempertahankan isi kesepakatan.⁴

Pembuatan kontrak dengan klien mendukung nilai dan misi profesi. melalui kontrak, pekerjaan sosial dan klien membuat suatu

² Tursina, Intan, Musfiroh, Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015). Hlm. 25, Diambil dari: <http://lib.unnes.ac.id/20229/1/1201411074-s.pdf> diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam : 15 .00 WIB

³ Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial-Social Workers' Desk Reference*, (PT BPK Gunung Mulia, Jakarta :2009). Hlm. xiii

⁴ Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial*-.....Hlm. 3

komitmen terhadap satu sama lain, dan terhadap tujuan pekerjaan mereka. Tiga jenis kontrak yang sangat berbedayang digunakan dalam setting pelayanan sosial pada umumnya. Kontrak pelayanan atau kesepakatan pelayanan pada umumnya mencakup (1) misi badan sosial, (2) deskripsi program dan pelayanan badan sosial, (3) kerangka waktu bagi penyelenggaraan pelayanan, (4) biaya pelayanan atau ketentuan bagi pengganti biaya pelayanan, (5) kebijakan tentang kerahasiaan, (6) hak untuk mengakses dalam file, (7) memberikan/ membocorkan informasi untuk direkam kedalam video, atau rekaman, (8) memberikan/membocorkan formulir informasi.⁵

Permasalahan sosial seperti diatas juga dapat ditangani melalui suatu pembangunan kesejahteraan sosial. Agar berhasilnya pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang tepat. Sebuah perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang tepat memerlukan data-data yang cepat, tepat dan dapat dipercaya. Disadari pula bahwa pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan dukungan dari masyarakat. Usaha dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaksana utama, sedangkan pemerintah adalah menetapkan regulasi dan memberikan fasilitas.⁶

Tugas- tugas pekerjaan sosial bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai pekerja sosial saja, masyarakat juga memiliki

⁵ Albert,Robert,Gilbert, Greene, *Pekerjaan sosial*.....Hlm. 4

⁶ Tursina, Intan, Musfiroh, *Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* Hlm. 3

peranan penting dalam melakukan tugas tersebut dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Indonesia memiliki tatanan pemerintahan dari tertinggi sampai dengan terendah. Sesuai dengan bunyi UUD pasal 18 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang- undang.⁷

Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU Nomer 32 Tahun 2004, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan Desa dengan pemerintah supra Desa juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di tingkat Desa.⁸

Uraian diatas menunjukkan bahwa, Pemerintahan Desa merupakan subjek penting terkait masalah sosial yang dihadapi masyarakat Desa sendiri, dengan kata lain Pemerintah Desa berperan penting untuk melakukan perubahan bagi Desa melalui pelayanan sosial. Pemerintah Desa pada hakikatnya merupakan pelayan bagi masyarakat Desa sendiri, oleh karenanya upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam

⁷ Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 18, ayat (1)

⁸ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Setara Press, Malang: 2014). Hlm. 16

mewujudkan Desa sejahtera perlu adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat Desa.

Pelayanan sosial diberikan sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditunjukkan untuk menyebarkan kesejahteraan. Namun pelayanan sosial disini bukan satu- satunya alat yang digunakan untuk mengentaskan permasalahan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial ini diberikan sebagai strategi untuk membenaran dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang ada. Dalam hal ini paradigma kesejahteraan sosial yang mengacu pada perumusan kebijakan berdasarkan atas kenyamanan masyarakat, sehingga menciptakan kesejahteraan.⁹

Berkaitan dengan pelayanan sosial, desa dalam hal ini memiliki peranan penting, pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam menjalankan program kesejahteraan sosial, melalui proses pelayanan sosial, seperti yang sudah diselenggarakan di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merupakan Desa yang terdiri dari kawasan perbukitan, lembah dan dataran rendah yang diapit tiga baris pegunungan dengan *landscape* hutan pinus di bagian utara dan timur desa, dengan luas 1.302 Hektar, 2 dusun, 7 RW dan 41 RT.¹⁰

⁹ Ari, Sugeng, Martopo, Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014, *Skripsi*, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). Hlm. 18. Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam : 17 .00 WIB.

¹⁰ Wilayah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, diambil dari : <https://www.dermaji.desa.id/wilayah>. Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45WIB

Sejarah desa Dermaji tidak ada sumber primer, baik prasasti ataupun naskah tertulis yang menjelaskan sejarah awal keberadaan Desa Dermaji. Sejarah Desa Dermaji hanya dipahami dari cerita lisan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dari cerita-cerita lisan itu diyakini bahwa Desa Dermaji termasuk salah satu desa yang keberadaannya sudah cukup tua. Desa Dermaji diperkirakan sudah ada pada masa-masa berdirinya Kerajaan Galuh, Jawa Barat pada abad ke – 6 Desa Dermaji masuk wilayah Kerajaan Galuh.¹¹

Warga Desa Dermaji juga memiliki leluhur yang dikenal dengan nama Mbah Darmokusumo. Mbah Darmokusumo ini seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan totalitas kepasrahan kepada Sang Illahi. Bagi warga Dermaji, sosok Darmokusumo menjadi sosok yang dibanggakan, sosok Darmokusumo seringkali dikait-kaitkan dengan asal-usul nama Dermaji. DERMA berarti memberi, AJI berarti sesuatu yang berharga. Desa Dermaji telah dipimpin oleh 11 Lurah/Kepala Desa.¹²

Desa Dermaji memiliki segudang prestasi seperti; mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 Desa Unggulan Tempo 2016 yang diberikan oleh Tempo Media Group bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

¹¹ Sejarah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.Dermaji.Desa.Id/Sejarah/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

¹² Sejarah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.Dermaji.Desa.Id/Sejarah/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

Kemudian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi Desa Dermaji mendapatkan penghargaan DesTIKa desa.id Awards 2016 dalam Festival DesTIKa ke-4 di Kab. Jayapura, Papua. Penghargaan ini mengukuhkan Dermaji sebagai desa yang telah menjadi pelopor dalam publikasi daring memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta domain internet khusus desa, desa.id.

Dibidang kebersihan dan kesehatan Desa Dermaji mendapatkan sertifikat ODF yaitu bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Ada beberapa desa di Kabupaten Banyumas yang menerima Sertifikat ODF pada tahun 2016.

Kemudian untuk Kepala Desa Dermaji yaitu bapak Bayu Setyo Nugroho, bersama beberapa tokoh nasional lainnya, mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Menginspirasi (*Inspiring Young Leader*) dari Portal Berita Beritasatu.com. Penghargaan diberikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta.

Dibidang infrastruktur Desa Dermaji juga mendapatkan penghargaan Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan pada proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Dermaji.¹³

Latar belakang tersebut menjadi penting dan menarik untuk di bahas dan diteliti, oleh karenanya peneliti bermaksud untuk melakukan

¹³ Prestasi Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari <https://www.dermaji.desa.id/prestasi/> Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

penelitian tentang **“Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional tentang judul skripsi **“Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**, peneliti mendefinisikan judul tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah:

1. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah bagiandari pelayanan publik, Berbagai pengertian mengenai Pelayanan (*service*) banyak dikemukakan oleh para ahli; diantaranya menurut American Marketing Association, seperti dikutip oleh Donald W, menyatakan bahwa; “Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serat tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”, sementara menurut *Lovelock Christoper*, bahwa “service adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebar dan dirasakan atau dialami”. Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat

dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.¹⁴

Pelayanan sosial lebih ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan.¹⁵

2. Pemerintah Desa

Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman,

¹⁴ Lutfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Intrans Publishing , Malang:2015). Hlm. 105-106

¹⁵ Janianton, Damanik, Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (1-14) ISSN 1410-4946 (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. 2011). Hlm. 2. Diambil dari: https://www.researchgate.net/publication/235351498_Menuju_Pelayanan_Sosial_yang_Berkeadilan. Diakses pada Tanggal: 26 November 2018, pukul : 09.18 WIB

dan partisipatif. Adapun penyelenggara pemerintahan desa yaitu terdiri dari; Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).¹⁶

Pemerintahan Desa, didalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti sehingga tujuan dan sasaran akhirnya menjadi jelas, terarah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dalam hal ini rumusan masalah yang diangkat adalah apa saja program Pelayanan Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

¹⁶ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 51,73,76

¹⁷ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, (Setara Press ,Malang: 2012). Hlm.62

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui bentuk Pelayanan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam melakukan Pelayanan Sosial bagi Masyarakatnya
- 2) Mengetahui strategi Pelayanan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam melakukan Pelayanan Sosial bagi Masyarakatnya

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang Pengembangan Masyarakat Islam
- 2) Menambah wawasan keilmuan tentang Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

- 3) Menambah wawasan tentang pekerjaan sosial dalam hal ini di bidang Pelayanan Sosial.
- b. Manfaat secara Praktis
- 1) Sebagai sarana bagi peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan proposal penelitian.
 - 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencapai tujuan yang berkenaan dengan pelayanan sosial.
 - 3) Sebagai bentuk partisipasi dalam rangka meningkatkan keajahteraan masyarakat melalui program Pelayanan sosial.

E. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan tema kajian yang akan diteliti. Kajian pustaka ditulis untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah :

Pertama, jurnal dari Janianton Damanik yang berjudul “*Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*”, dari jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 15 Nomor 1 ISSN 1410-4946 Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2011. Jurnal ini membahas tentang gagasan awal model pelayanan sosial yang berkeadilan dengan cara mendekonstruksi praktek-praktek pelayanan sosial seperti ini. Hasil Penelitian pertama adalah Konsep Pelayanan Sosial dan Pelayanan Sosial

Berkeadilan melalui Model Alternatif.¹⁸ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan bentuk penelitian, yaitu penelitian ini melalui jurnal sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi. Persamaan penelitian pertama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama dalam penggunaan teori pelayanan sosial.

Kedua, skripsi dari Tursina Intan Musfiroh Dengan Judul “*Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga*”, dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang dilakukan pada tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang perencanaan, pelaksanaan program layanan sosial di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga. Hasil penelitian yang kedua adalah klasifikasi penerima layanan sosial, seperti jenis- jenis dari PMKS, kemudian jenis pelayanan sosial dan proses pelayanan sosial yang ada di Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak Woro Wiloso Salatiga.¹⁹ Sedangkan perbedaan penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian dan sasaran penelitian. Persamaan penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama dalam menggunakan teori layanan sosial, yaitu menerapkan program pelayanan sosial.

¹⁸ Janianton Damanik, Menuju Pelayanan Sosial yang BerkeadilanHlm.2,9

¹⁹Tursina Intan Musfiroh, (Implementasi Program Balai Pelayanan SosialHlm. 27,40

Ketiga, skripsi dari Ari Sugeng Martopo dengan judul “*Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014*”, dari jurusan Ilmu Kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2015. Penelitian yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana efektifitas atau tingkat pelayanan sosial yang diterima oleh alumni panti sosial karya wanita. Hasil penelelitian yang ketiga adalah hasil efektif program pelayanan sosial yang ditunjukkan kepada wanita rawan sosial , namun untuk mencapai tingkat efektivitas bagi alumni lulusan 2012- 2014 di Panti Sosial Karya Wanita Yogyakarta harus disertai dengan adanya bantuan pendukung dalam mengaplikasikan ketrampilan.²⁰ Sedangkan perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian dan sasaran penelitian juga pada pendekatannya. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian yang akan di lakukan adalah sama dalam menggunakan teori pelayanan sosial, mulai dari pengertian pelayanan sosial, fungsi dan tujuan pelayanan sosial.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

²⁰ Ari Sugeng Martopo, (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)Hlm. 78

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori, dalam penelitian ini berisi tentang: konsep pelayanan sosial meliputi: pengertian pelayanan sosial, strategi pelayanan sosial, bidang pelayanan sosial, fungsi dan tujuan pelayanan sosial. Pemerintah Desa: pengertian pemerintah Desa, kedudukan dan kewenangan pemerintah Desa dan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Bab III. Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu Penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian, berupa 1) gambaran umum lokasi penelitian berupa profil Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, 2) penyajian data, 3) analisis data, dan Pembahasan tentang proses dan hasil pelayanan sosial yang di selenggarakan pemerintah Desa Dermaji.

Bab V. Kesimpulan, berupa kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PELAYANAN SOSIAL

1. Pengertian pelayanan Sosial

Pelayanan sosial (*social service*) pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didisain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Layanan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok- kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai satu kesatuan.²¹

Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial berkaitan dengan konsep Negara Kesejahteraan (*welfer state*). Negara kesejahteraan merupakan sistem yang memberi peran kepada negara untuk pro-aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Selain itu, sebagai sebuah aktivitas yang terorganisir, pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial sebagai profesi kemanusiaan yang memiliki tugas utama memberikan atau mendistribusikan pelayanan sosial.²²

²¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2015) hlm. 107

²² Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Alfabeta, Bandung : 2007) hlm.154

Menurut *Romanyshyn*, pelayanan sosial merupakan usaha- usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu- individu dan keluarga- keluarga melalui (1) sumber- sumber sosial pendukung, dan (2) proses- proses yang meningkatkan kemampuan individu- individu dan keluarga- keluarga untuk mengatasi stres dan tuntutan- tuntutan kehidupan sosial yang normal.²³

Adapun pengertian lainnya, Pelayanan sosial secara *historis*, perkembangan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sistem Negara Kesejahteraan (*welfer state*) khususnya di negara- negara Eropa Barat segera setelah perang dunia ke II berakhir. sistem Negara Kesejahteraan mengacu pada konsep dan sekaligus pendekatan yang menekankan pentingnya pemberian pelayanan sosial dasar bagi setiap warga negara. Sedangkan secara *ideologis*, pelayanan sosial didasari keyakinan bahwa tindakan sosial dan pengorganisasian sosial merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan sosial sebagai representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warga negara.²⁴

Sedangkan untuk dasar adanya pelayanan sosial terdapat pada Undang- Undang Nomer 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (1) menjelaskan, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

²³ Adi Fahrudin, *Pengantar kesejahteraan sosial*, (PT Refika Aditama, Bandung : 2012) hlm. 51

²⁴ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 155

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, “Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila”.²⁶

2. Strategi Pelayanan Sosial

Aktivitas pengembangan komunitas tradisional pada dasarnya merupakan pengembangan pelayanan sosial yang mencakup identifikasi kebutuhan- kebutuhan sosial dan tersedianya struktur serta pelayanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai berikut :

- a. Identifikasi persoalan yang menjadi perhatian umum terhadap penyediaan layanan dalam masyarakat secara luas (seperti kurangnya fasilitas rekreasi untuk anak remaja, kurangnya tempat emergensi bagi kaum perempuan dalam krisis, perumahan yang tidak memadai para lansia yang tak terurus, dan vandalisme yang meningkat).

²⁵ Undang- Undang Nomer 11 Tentang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009. Diakses pada hari selasa 25/6/2019, pukul 09:00, diambil dari <http://luk.staff.ugm.ac.id>.

²⁶ Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jurnal Al-Bayan Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014) hal. 45, Diakses pada hari selasa 25/6/2019, pukul 09:30, diambil dari : <http://jurnal.ar-raniry.ac.id>

- b. Sebuah studi yang lebih detail atau sistematis tentang kebutuhan atau problem untuk menentukan sifat dan luasannya, misalnya melalui diskusi dengan penyedia pelayanan, survei kebutuhan, yang melihat pada apa yang terjadi ditempat- tempat lain, pengujian statistik yang relevan (seperti angka kemiskinan).
- c. Pertemuan publik, forum atau konsultasi dengan semua orang- orang terkait untuk mendorong mereka menghadiri dan berpartisipasi. Badan ini memutuskan tentang beberapa tindakan (membentuk komite untuk menyelidiki persoalan lebih lanjut, membawa persoalan itu kepada organisasi yang ada, atau membentuk perwakilan berbasis masyarakat yang baru seperti perlindungan kaum perempuan, balai masyarakat, kepemudaan)
- d. Melengkapi formalitas- formalitas yang diperlukan untuk membentuk badan baru, seperti mendirikan konstitusi, membentuk badan hukum yang sah, membuka rekening bank, atau mungkin mendaftar sebagai koperasi.
- e. Pengembangan dan pelaksanaan badan baru yang sedang berjalan mencakup pemberdayaan orang- orang untuk terlibat secara aktif dan responsif.

- f. Memantau dan mengevaluasi badan baru yang ada dari pelayanannya meliputi penjaminan bahwa badan baru tersebut dapat akuntabel pada masyarakat lokal dan atau konstituennya.²⁷

Strategi diatas menjadi dasar pelaksanaan pelayanan sosial baik oleh individu maupun kelompok, dalam hal ini adalah pemerintah Desa yang memiliki peran sebagai fasilitator.

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau menyediakan fasilitas, membantu dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat dalam menghadapi segala permasalahan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dimulai dari memfasilitasi identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuann masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai sampai penetapan cara mencapai tujuan.²⁸

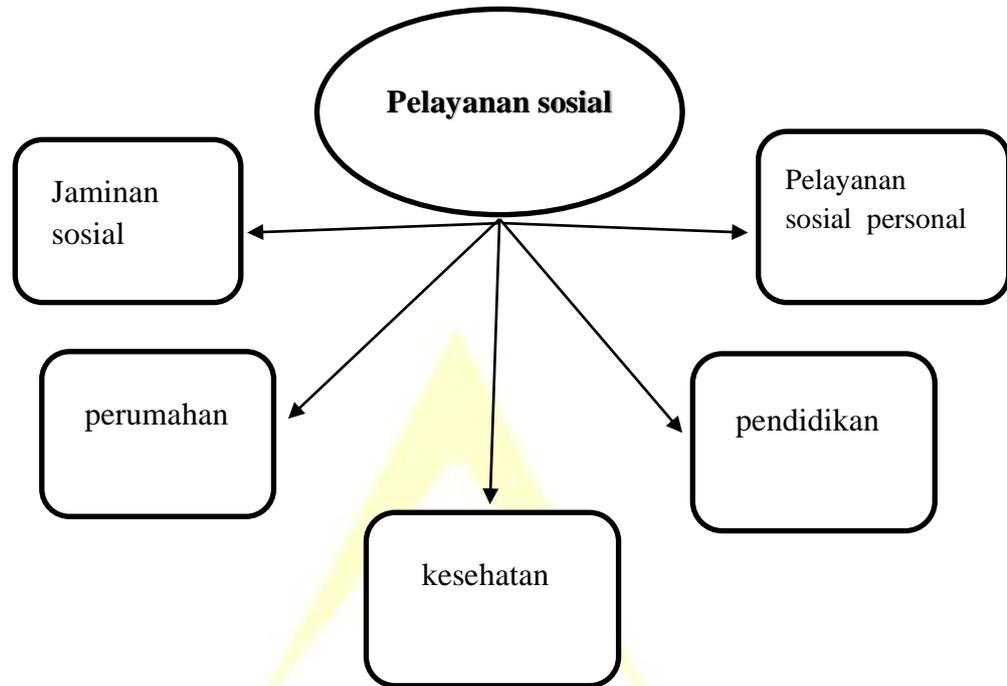
3. Bidang Pelayanan Sosial

Secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu: jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau

²⁷ Jim Ife, Frank Tesoriero, *Community Development: Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 2016) hlm. 412- 414

²⁸ Sumaryo Gitasaputra, kardiya K. Ranga, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah*, (Graha Ilmu, Yogyakarta : 2015) hlm. 51

perawatan sosial personal, hal ini dikemukakan oleh *Spicker dan Thompson*. Berikut juga gambar bagan bidang pelayanan sosial.²⁹



a. Jaminan Sosial

Jaminan sosial (*social security*) menunjuk pada sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didisain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang- kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial menjadi salah satu bentuk atau wujud layanan sosial yang diharapkan dapat menangani masalah- masalah sosial seperti ekonomi dan

²⁹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 156 -157

ketenagakerjaan, bidang- bidang yang terkait dengan jaminan sosial itu seperti asuransi, tunjangan profesi dan lainnya.³¹

Adapun Bidang- Bidang yang terkait dengan jaminan sosial seperti:³²

1) Program Bantuan sosial (*publik assistance/ social assistance*)

yang dibiayai dari pajak antara lain sebagai berikut:

- a) Bantuan perawatan medis (*medicaid*)
- b) Bantuan untuk lanjut usia (*old age assistance*)
- c) Bantuan bagi penyandang cacat netra (*aid to the blind*)
- d) Bantuan bagi penyandang cacat tubuh (*aid to the permanentlyand totally disabled*)
- e) Bantuan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil (*aid to families with dependent children*)
- f) Bantuan umum (*general assistance*)

2) Program asuransi sosial (*social insurance*) yang dibiayai oleh pemilik perusahaan, berbentuk:

- a) Asuransi lanjut usia (*old age insurance*)
- b) Asuransi kecacatan (*disability insurance*)
- c) Asuransi bagi mereka yang tidak bekerja (*unemployment insurance*)
- d) Kompensasi bagi para pekerja (*workmen's compensation*)

³¹ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 157

³² Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*hlm. 95

e) Asuransi kesehatan (*medicare/ health insurance*)

f) Asuransi ibu hamil (*maternity insurance*).

b. Perumahan

Rumah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kemudian negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khususnya bagi mereka masyarakat miskin.

Dalam hal ini bidang atau program- program yang dapat dijadikan sebagai layanan seperti pembuatan rusunawa, perumahan sosial bisa meliputi:

- 1) Pemberian subsidi terhadap asosiasi penyandang penyedia perumahan bagi kelompok- kelompok khusus, misal; penyandang difabel dan lanjut usia
- 2) Pemberian subsidi atau kemudahan akses kredit bagi pembelian rumah.
- 3) Bantuan finansial bagi lembaga- lembaga sukarela yang menyediakan akomodasi dan dukungan terhadap tuna wisma.
- 4) Pemberian ijin dan pengawasan terhadap akomodasi atau rumah rumah sewa yang diselenggarakan masyarakat sehingga tidak melanggar standar dan ketentuan yang berlaku.³³

Berkaitan dengan perumahan atau ketersedian tempat tinggal bagi masyarakat bisa di berikan dengan bentuk renovasi bangunan,

³³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm.158

yang sekarang menjadi program pemerintah Desa dengan adanya RTLH (rumah tidak layak huni) yang kemudian nantinya dianggarkan melalui APBDes (Anggaran Perencanaan Belanja Desa).

c. Kesehatan

Bidang yang terkait layanan kesehatan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan hidup masyarakat, seperti; pengembangan sanitasi umum dan kebersihan, isu perawatan medis bagi masyarakat (*medical care*), keluarga berencana, pemantauan dan pengembangan layanan kesehatan tingkat lokal.³⁴

Selain program-program tadi bidang kesehatan menjadi salah satu bentuk layanan sosial yang sering kali diselenggarakan ditingkat rumah tangga, seperti adanya posyandu untuk balita ataupun poslansia untuk lansia.

Pelayanan kesehatan bukan hanya monopoli pemerintah saja, seperti halnya jaminan sosial dan perumahan, pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukan bagi warga yang kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan jaminan kesehatan, asuransi kesehatan. Selain itu peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan publik ini juga mencakup rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan, termasuk penetapan kebijakan

³⁴ Isbandi Rukminto Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL*hlm. 97

terhadap penyelenggaraan dan penyediaan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta.³⁵

d. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan; *Pertama*, sebagai penyedia utama lembaga- lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. *Kedua*, sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan baik pendidikan negeri, pendidikan swasta maupun lembaga- lembaga non formal, termasuk didalamnya penyediaan skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa- siswi yang berprestasi dan atau tidak mampu.³⁶

Pendidikan menjadi faktor utama adanya masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja dan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan diawal.

e. Pelayanan sosial personal

Pelayanan sosial personal merupakan salah satu bidang pelayanan pekerja sosial populer sejak tahun 1960-an. Pelayanan ini menunjukkan berbagai bentuk perawatan sosial (*social care*) di luar pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup 3 jenis:

³⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 158

³⁶ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 159

- 1) Perawatan anak (*child care*), perawatan anak diberikan terhadap anak- anak dan keluarganya, terutama anak- anak yang memiliki kebutuhan khusus, pelayanan ini bisa juga mencakup perlindungan anak (*childprotection*) dan pengasuhan anak semisal terhadap anak- anak yang ibunya kerja, khususnya jika pelayanan pendukung tidak tersedia.
- 2) Perawatan masyarakat (*community care*), merupakan alternatif terhadap pelayanan yang diberikan didalam lembaga (*institution-based care*). Pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat (*community- based rehabilitation*), dan rehabilitasi keliling (*mobile rehabilitation*), pelayanan tersebut biasanya diberikan oleh Dinas atau kantor sosial di Indonesia.
- 3) Peradilan kriminal (*criminal justice*). Pekerja sosial memiliki peranan penting dalam sistem peradilan kriminal. Mereka biasanya disebut pekerja sosial koreksional (*correctional social worker*). Biasanya mereka melakukan pelayanan konselingatau terapi psikososial terhadap narapidana yang masih dipenjara, maupun eks-narapidana yang sudah bebas.³⁷

4. Fungsi dan Tujuan Pelayanan sosial

Fungsi umum dari pelayanan sosial sebenarnya realisasi ide kedalam bentuk program yang dapat membantu individu untuk

³⁷ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm. 161

menemukan sebuah ide atau gagasan tentang bagaimana individu ini keluar dari permasalahan kesejahteraan sosial yang ada.

Pelayanan sosial dianggap sebagai fungsi dari perjalanan kebijakan suatu negara yang mana negara secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu orang yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial seperti keluarga miskin, anak terlantar pekerja anak dan kelompok-kelompok lainnya.³⁸

Sedangkan tujuan layanan sosial dalam Undang- Undang Nomer 11 Tahun 2009 pasal 6 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

³⁸ Ari Sugeng Martopo, (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)Hlm.19

- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain tujuan diatas, Leonard Schneiderman menguraikan tujuan-tujuan sistem kesejahteraan sosial sebagai berikut:³⁹

- a. sistem pemeliharaan/ *maintenance system*,
- b. sistem pengawasan/ *control system* dan
- c. sistem perubahan/ *change system*.

Secara garis besar fungsi dan tujuan adanya penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial yaitu memberikan suatu pelayanan bagi individu atau kelompok yang membutuhkan dalam upaya peningkatan hidup, juga dalam rangka mengentas masalah sosial yang terjadi.

B. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam Undang- Undang Dasar 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten atau kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang.”⁴⁰ Dari pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang- Undang Nomer 32 tahun 2004, pasal 1, ayat 12 yang menjelaskan bahwa: Desa atau yang disebut

³⁹ Sugeng Pujileksono, *Perundang- undangan sosial sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Setara Press, Malang : 2016) Hlm. 28- 29

⁴⁰.Undang- Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, memiliki posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Pemerintah Desa merupakan pemangku kebijakan sekaligus penyelenggara ditingkat terendah dalam struktural pemerintahan negara yang memiliki kedudukan dan kewenangannya sendiri ditingkat desa.

2. Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintahan Desa

a. Kedudukan

Terdapat tiga perspektif dalam menempatkan kedudukan desa;⁴²

- 1) Desa Adat atau Desa sebagai kesatuan masyarakat (*self governing community*),
- 2) Desa Otonom (*local self goverment*),
- 3) Desa administratif (*local state goverment*)

Dari ketiga pendapat mengenai kedudukan Desa diatas menjadi wujud perdebatan dikalangan elit politik, untuk penerapan kedudukan Desa itu sendiri masih fleksibel dan juga menyeluruh.

⁴¹ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Setara Press, Malang: 2014). Hlm 16- 17

⁴² Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 42

b. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Ndraha adalah “suatu kekuasaan yang sah atau *the power or right delegated or given, the power to judge, act or command*”. Desa memiliki dua jenis kewenangan yang utama yaitu:⁴³

- 1) Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: mengelola aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yuris-diksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
- 2) Kewenangan melekat (atribut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal desa): perencanaan pembangunan dan tata ruang desa membentuk struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, membentuk Badan Permusyawaratan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan lin-lain.

Kewenangan Desa diatas memberikan arti peranan pemerintahan Desa itu sendiri, yaitu menjadi pemberdaya, pengembang sekaligus penyelenggara kesejahteraan bagi masyarakat Desa itu sendiri.

⁴³ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 46

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa, Pemerintahan Desa adalah “ penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan penyelenggaranya adalah pemerintah desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut berdasarkan asas; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.⁴⁴

Perlu dipahami bahwa pemerintahan dengan pemerintah itu memiliki arti berbeda, pemerintahan berarti serangkaian kegiatan, sedangkan pemerintah itu pelaksana/ penyelenggaranya. Adapun penyelenggara pemerintahan desa yaitu terdiri dari; Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

a. Kepala Desa

Undang- Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 26, ayat (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan

⁴⁴ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 51

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴⁵

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari 1) sekertaris Desa, 2) Pelaksana kewilayahan, dan 3) pelaksana teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁴⁶

c. BPD (Dewan Permusyawaratan Desa)

BPD (Dewan Permusyawaratan Desa) merupakan mitra kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.⁴⁷

⁴⁵ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 74
⁴⁶ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 75
⁴⁷ Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*.....Hlm. 76

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Berdasarkan sifatnya data dibedakan atas data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif memiliki ciri; dinyatakan dengan angka, batas antar nilai jelas atau tegas, sedangkan kualitatif memiliki ciri; tidak selalu dinyatakan dengan angka, data antar nilai tidak jelas dan tegas, dan tidak memiliki satuan.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁴⁹

Beberapa jenis penelitian dapat dibagi berdasarkan fungsi penelitian, pendekatan penelitian serta tujuan atau metode penelitian, menurut Nana Syaodih Sukmadinata yaitu :⁵⁰

1. Berdasarkan fungsi penelitian:
 - a. Penelitian Dasar
 - b. Penelitian Terapan
 - c. Penelitian Evaluatif
2. Berdasarkan pendekatan penelitian:
 - a. Penelitian kuantitatif
 - b. Penelitian kualitatif

⁴⁸ Piran, Wiioatmodjo, *Dasar Penelitian Dan Statistika*.....Hlm.33

⁴⁹ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2000) Hlm.35

⁵⁰ Erna Kurniawati Pamungkas, *Peran Serta Dan Keterlibatan Masyarakat*..... hlm. 39-40

3. Berdasarkan tujuan atau metode penelitian :

- a. Penelitian Deskriptif
- b. Penelitian Prediktif
- c. Penelitian Improfitif
- d. Penelitian Eksplanatif

Melihat uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian kualitatif deskriptif yang berjudul **“Bentuk Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

1. Tempat penelitian

Tempat atau lokasi yang digunakan untuk penelitian ada di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Agustus Tahun 2019 sampai bulan September tahun 2019.

C. SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

1. Subyek Penelitian

Subyek adalah Subjek penelitian merupakan data yang diperoleh dari manusia yang dijadikan sebagai informan, subyek tersebut adalah Pemerintah Desa meliputi: Kepala Desa, Sekertaris Desa sebagai penyelenggara program pelayanan sosial dan ketua BPD, salah satu masyarakat yaitu ibu Maesyaroh. sebagai pengawas dan partisipan program pelayanan sosial.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran yang menjadi pokok untuk diteliti, obyek penelitian tersebut adalah Program pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

D. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh atau di kumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi kegiatan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁵²

Sumber Sekunder dalam penelitian ini adalah, buku-buku, jurnal penelitian, skripsi baik hard maupun soft copy, yang berkaitan dengan layanan sosial.

⁵¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm.39

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2015), Hlm. 193

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Bahasan teknik pengumpulan data meliputi; angket, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk metode kualitatif angket tidak diikutkan.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban- jawaban responden dicatat atau direkam dengan alatperekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak- anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.⁵³

Teknik wawancara ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang upaya pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan sosial bagi masyarakat, dengan cara mewawancarai Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BPD, aktivis PKK (Bendahara PAUD) dan ibu Maesyaroh sebagai warga Desa Dermaji.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini

⁵³ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*Hlm. 67- 68

diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan- pertanyaan.⁵⁴

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan layanan sosial.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak berlangsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.⁵⁵

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁵⁶

Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori serta segala bentuk apapun yang terkait dengan layanan sosial.

F. ANALISI DATA

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih

⁵⁴ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*Hlm. 69

⁵⁵ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*Hlm. 70

⁵⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Bila dilihat sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dan jika dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi.⁵⁸

Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data- data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi untuk dijadikan satu dan mempermudah melakukan analisis.

2. Reduksi Data

Setelah memperoleh data dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.....Hlm. 335

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*.....Hlm. 193-194

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan peneliti mengenai data yang diperoleh.⁵⁹

Reduksi data pada penelitian ini digunakan untuk mengambil poin- poin penting yang bersumber dari banyak data, seperti halnya mengklasifikasikan layanan sosial yang ada di desa Dermaji.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data dapat dilakukan dengan mengikuti urutan waktu pengumpulan secara penuh atau sebagian saja, penyusunan data dapat dilakukan berdasarkan tipologi atau jenisnya, dapat pula dilakukan dengan kombinasi antara kedua cara tersebut.⁶⁰

Penyusunan data dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengklasifikasikan semua data yang sudah diperoleh untuk merencanakan hal berikutnya, seperti bab II dan seterusnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dalam melakukan analisis data peneliti harus melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.⁶¹ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini digunakan sebagai penjelas dalam mengelompokan data- data yang sudah diperoleh, dari banyaknya informasi yang kemudian diperjelas dengan cara menyimpulkan.

⁵⁹ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*Hlm. 338.

⁶⁰ Irawan, Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*Hlm. 21

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*Hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

1. Sejarah Desa Dermaji

Sejarah Desa Dermaji tidak ada sumber primer, baik prasasti ataupun naskah tertulis yang menjelaskan sejarah awal keberadaan Desa Dermaji. Sejarah Desa Dermaji hanya dipahami dari cerita lisan yang disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Dari cerita-cerita lisan itu diyakini bahwa Desa Dermaji termasuk salah satu desa yang keberadaannya sudah cukup tua. Desa Dermaji diperkirakan sudah ada pada masa-masa berdirinya Kerajaan Galuh, Jawa Barat pada abad ke – 6 Desa Dermaji masuk wilayah Kerajaan Galuh.

Warga Desa Dermaji juga memiliki leluhur yang dikenal dengan nama Mbah Darmokusumo. Mbah Darmokusumo ini seringkali digambarkan sebagai sosok yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi dan totalitas kepasrahan kepada Sang Illahi. Bagi warga Dermaji, sosok Darmokusumo menjadi sosok yang dibanggakan, sosok Darmokusumo seringkali dikait-kaitkan dengan asal-usul nama Dermaji. DERMA berarti memberi, AJI berarti sesuatu yang berharga. Desa Dermaji telah dipimpin oleh 11 Lurah/Kepala Desa.⁶²

⁶² Sejarah Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari www.dermaji.desa.id. Diakses Pada Tanggal 26 November 2018 Jam : 20.45 WIB

2. Letak Wilayah Desa Dermaji

Desa Dermaji memiliki luas wilayah 1.302 Hektar, terdiri dari kawasan perbukitan, lembah dan dataran rendah yang diapit tiga baris pegunungan dengan landscape hutan pinus di bagian utara dan timur desa. Desa Dermaji terbagi menjadi 2 Dusun, terdiri dari 7 RW dan 41 RT.

Jika di runtutkan menjadi:

- a. Luas wilayah = 1302 Ha
- b. Luas Lahan Pertanian = 96 Ha
- c. Luas Lahan Perkebunan = 649 Ha
- d. Luas Lahan Permukiman = 31 Ha

3. Kependudukan Desa Dermaji

Berdasarkan data statistik desa Dermaji tahun 2019 jumlah kepala keluarga sebanyak 2173 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki- laki sebanyak 3254 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3123 jiwa, sehingga total penduduk Desa Dermaji sebanyak 6410 jiwa.

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tidak/ Belum Sekolah	1.228 Jiwa
Belum Tamat SD/ Sederajat	631 Jiwa
Lulusan Sekolah Dasar (SD)	3.100 Jiwa
Lulusan SLTP	968 Jiwa

Lulusan SLTA	390 Jiwa
Lulusan D1/D2	17 Jiwa
Lulusan D3	19 Jiwa
Lulusan S1	54 Jiwa
Lulusan S2	-
Lulusan S3	-

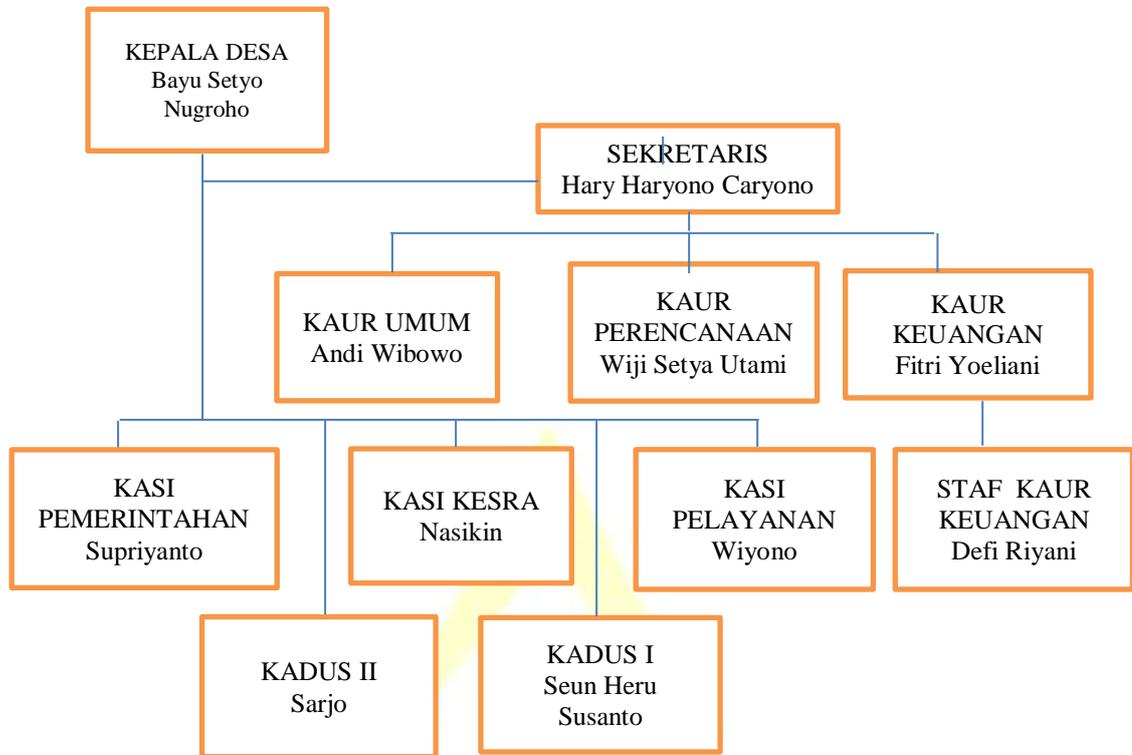
Gb. Tabel Jumlah Penduduk menurut Pendidikannya

b. Jumlah Penduduk menurut pekerjaan

Petani/ perkebun	2467 Jiwa
Belum/ Tidak Bekerja	1306 Jiwa
Pelajar/ Mahasiswa	619 Jiwa
Mengurus Rumah Tangga	556 Jiwa
Buruh tani/ Perkebunan	433 Jiwa
Karyawan Swasta	403 Jiwa
Wiraswasta	346 Jiwa
Buruh Harian Lepas	53 Jiwa
Guru	40 Jiwa
Pedagang	30 Jiwa
PNS/ Pegawai Negeri Sipil	22 Jiwa
Sopir	17 Jiwa
Perangkat Desa	12 Jiwa

Gb. Tabel Jumlah Pendudukan berdasarkan pekerjaan

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dermaji



Gb. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dermaji

5. Lembaga- lembaga di Desa Dermaji

- a. PKK (Program kesejahteraan keluarga)
- b. LINMAS (Perlindungan Masyarakat)
- c. Karang Taruna Desa Dermaji
- d. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- e. TK (Taman Kanak Kanak)
- f. PWD (Paguyuban Wong Dermaji)
- g. BUMDes Aji Mandiri
- h. PKD (Poliklinik Kesehatan Desa)

6. Prestasi Desa Dermaji

- a. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Desa Dermaji masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.
- b. KIP AWARDS 2018 (Komisi Informasi Prov. Jawa Tengah). Desa Dermaji mendapat penghargaan sebagai Desa dengan Website Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018.
- c. Desa Unggulan Tempo (Tempo Media Group & Kemendesa PDTT RI). Desa Dermaji mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 Desa Unggulan Tempo 2016 yang diberikan oleh Tempo Media Group bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- d. Destika desa.id Awards 2016 (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Desa Dermaji mendapatkan penghargaan DesTIKa desa.id Awards 2016 dalam Festival DesTIKa ke-4 di Kab. Jayapura, Papua. Penghargaan ini mengukuhkan Dermaji sebagai desa yang telah menjadi pelopor dalam publikasi daring memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta domain internet khusus desa, desa.id.
- e. ODF (Open Defecation Free) Pemkab Banyumas. Desa Dermaji mendapatkan sertifikat ODF (Open Defecation Free) tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- f. Inspiring Young Leader 2014 Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho, bersama beberapa tokoh nasional lainnya, mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Muda yang Menginspirasi (Inspiring Young Leader) dari Portal Berita Beritasatu.com. Penghargaan diberikan oleh Presiden terpilih Joko Widodo di Jakarta.
- g. Sikompak Awards 2014 dari Pemprov Jawa Tengah. Desa Dermaji mendapatkan penghargaan Sikompak Award 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan pada proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Dermaji.⁶³

B. BENTUK PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

Pada bab II tentang kajian teori sudah dijelaskan pengertian, tujuan dan bentuk pelayanan sosial, yang kemudian pada bab IV peneliti mencoba menjelaskan terkait pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji. Pada saat melaksanakan penelitian peneliti menemukan beberapa hal terkait apa saja pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dermaji. Untuk mengetahui apa saja pelayanan sosial yang ada di Pemerintah Desa Dermaji perlu diketahui lahirnya sebuah pelayanan berasal dari penggalian data terkait permasalahan yang ada di Dermaji, dan ini tersusun didalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Dermaji Bapak Bayu Setyo Nugroho.

⁶³Prestasi desa Dermaji Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Diambil dari www.dermaji.desa.id. Diakses Pada Tanggal 12 September 2019 Jam : 20.45 WIB

“Untuk program sendiri sebenarnya sangat banyak, dan itu kita rekam atau kita catat dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang bersifat 1 tahun kedepan, program- program itu ratusan di empat bidang; bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan pemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dari semua program tersebut terlahir dari masyarakat.”⁶⁴

Pelayanan Sosial yang ada di Pemerintahan Desa Dermaji tersusun didalam program desa itu sendiri. Namun untuk pelayanan yang menjadi pokok yaitu layanan sosial dasar, dimana layanan sosial dasar ini meliputi; air bersih, perpustakaan desa dan musium naladipa. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji ketika wawancara berlangsung, mengatakan:

“Layanan sosial dasar menjadi salah satu kewajiban kami (Pemerintah Desa), namun lebih fokus terlaksana lewat lembaga yang ada seperti PKK Desa yang membawahi PKK RW yang masing- masing mempunyai posyandu balita, posyandu lansia.”⁶⁵

Adapun pembahasan terkait pelayanan sosial ini, meliputi beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyelegaraan Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial tentu harus melihat tepat atau tidak kepada penerima layanan, oleh karenanya Pemerintah Desa Dermaji memiliki strategi dalam melaksanakan sebuah pelayanan kepada masyarakat, strategi inilah yang menjadi kunci utama melaksanakan sebuah pelayanan. *Pertama*, dengan melakukan asesmen atau penggalihan data melalui masyarakat, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh

⁶⁴.Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji,, pada tanggal 10 September 2019

⁶⁵.Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji,, pada tanggal 10 September 2019.

bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji dalam wawancara, mengatakan;

“Pelayanan sosial di Desa Dermaji, kita awali dari penggalian gagasan, kebutuhan masyarakat yang direncanakan. Kemudian dilaksanakan dari pelaksanaan itu kita menggandeng semua elemen, unsur- unsur itu yang bisa mendukung kita libatkan.”

“Dalam hal ini (strategi pelayanan sosial) tentu kita berangkat dari masyarakat, mulai dari penggalian informasi atau masalah, yang kemudian dalam pelaksanaannya kita menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi.”⁶⁶

Atau juga disebut pemetaan informasi yang ada di desa. *Kedua*, dengan cara mencari pihak- pihak terkait pelaksana pelayanan, seperti organisasi- organisasi yang ada di Desa. *Ketiga*, pengarahan dan pembinaan kepada kader- kader organisasi yang terlibat. Dan yang ke *empat*, memasukan dan mencatatkan rencana dalam anggaran desa, yang kemudian ketahap pelaksanaan. Hal ini dikuatkan dari jawaban bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji dalam wawancara ,mengatakan;

“Pertama memetakan informasi yang ada di desa terkait bidang- bidang tadi, yang kedua kita kuatkan organisasi yang ada di desa, yang ketiga kita berikan pelatihan peningkatan kapasitas kader- kader yang berkaitan, dan yang selanjutnya yang paling utama kita masukan kegiatan/ program itu ke anggaran desa/ APBDes karena setiap kegiatan tanpa adanya anggaran tidak mungkin terlaksana.”⁶⁷

Dalam pelaksanaan sebuah pelayanan, pemerintah Desa melakukan kerjasama dan pelibatan masyarakat, hal ini sesuai dengan yang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji,, pada tanggal 10 September 2019

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

disampaikan oleh bapak Bayu Setya Nugroho dan Bapak Harry Haryono

Caryono selaku Pemerintah Desa Dermaji dalam wawancara:

“Kita ada lembaga- lembaga Desa yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, seperti terkait dengan administrasi langsung ke pemerintah desa, lembaga lain seperti pos paud, perpustakaan desa dibidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan kita ada posyandu, poli klinik dan juga desa siaga. Semisalkan kasus gisi buruk peran peran kader di lembaga disini menjadi penting, kader langsung mengidentifikasi, dan kemudian langsung berkordinasi dengan puskesmas atau bidan desa.”⁶⁸

“Membuat kader- kader seperti melalui FKD (Forum Kesehatan Desa) dibidang kesehatan, membentuk kelompok- kelompok yang dilegalitas oleh desa dengan adanya SK (surat keputusan) dari desa. Setelah itu kader- kader tersebut melaksanakan tugas- tugasnya berdasarkan bidang yang dibentuk. Melakukan identifikasi masalah misal dibidang kesehatan lansia yang kemudian disitu ada program cek kesehatan gratis dari desa, semua proses pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga yang terkait.”⁶⁹

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan terkait strategi pelayanan sosial di pemerintah Desa Dermaji, disini memiliki pokok strategi yaitu melibatkan masyarakat sebagai penerima pelayanan juga sebagai pelaksana sebuah pelayanan, mulai dari proses penggalian gagasan, perencanaan, hingga pelaksanaan, pemerintah Desa disini membuktikan bahwa transparasi dan partisipasi Pemerintah Desa kepada masyarakatnya telah terlaksana dengan baik.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

2. Bentuk- bentuk Pelayanan Sosial yang ada di Pemerintah Desa Dermaji

Mengacu pada *Spicker* dan *Thompson*, bahwa secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketetapan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu: jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal.⁷⁰

Dan dari bidang- bidang tersebut ada sebuah bentuk pelayanan yang diberikan, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber, bahwa Pemerintah Desa Dermaji mengadakan pelayanan dibidang; pelayanan perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, yang mengatakan:

“Misalkan perbaikan jalan untuk peningkatan percepatan ekonomi, dan juga air bersih untuk peningkatan kebutuhan juga yang kami alirkan kesetiap rumah- rumah warga yang kemudian dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Posyandu dan poliklinik dibidang kesehatan. PAUD desa dan perpustakaan itu juga masuk kepelayanan sosial dibidang pendidikan.”⁷¹

Dalam wawancara kepada perangkat lain beliau bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji dalam wawancara, mengatakan;

“Bentuk bentuk pelayanan sosial yang kami lakukan dan di kelompokkan kedalam *layanan sosial dasar*, yaitu meliputi; air bersih, perpustakaan Desa, musium naladipa.”⁷²

⁷⁰ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*.....hlm.156- 157

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

⁷². Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

Dalam bidang jaminan sosial dan pelayanan personal tidak ada karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah Desa, melainkan pemerintah daerah dan pusat, hal ini sesuai dengan yang dikatakan beliau Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji dalam wawancara ,mengatakan:

“Kita mengikuti kepemerintah pusat, karena desa tidak berwenang dibidang jaminan sosial, kita hanya sebatas pengusulan kepada pemerintah daerah/ pusat, jadi di desa tidak ada.”⁷³

Peneliti mengambil kesimpulan, yang artinya pemerintah Desa Dermaji mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelayanan sosial tersebut kedalam 3 bidang tadi. Sedangkan untuk bentuk bentuk pelayanan sosial dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pelayanan Perumahan

Pemerintah Desa Dermaji memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya di bidang pelayanan perumahan, yaitu berupa; pembangunan rumah tidak layak huni dan air bersih yang dialirkan kerumah- rumah warga melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Aji Mandiri, yang merupakan BUMDesa Dermaji itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beliau bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, yang mengatakan:

“Semua arah program sebenarnya mengarah kesitu, misalkan perbaikan jalan untuk peningkatan percepatan ekonomi, dan juga air bersih untuk peningkatan kebutuhan juga yang kami alirkan kesetiap rumah- rumah warga yang kemudian dikelola

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),”Seperti yang sudah dijelaskan diawal itu semua menjadi wujud kerja pemerintah Desa melaksanakan pelayanan sosial, seperti insfrastruktur pembangunan rumah tidak layak huni setiap tahun, pos paud, posyandu, perpustakaan jagad aksara, musium naladipa, air bersih, pelatihan budidaya kambing,⁷⁴

Dalam pelaksanaan pelayanannya untuk renovasi rumah tidak layak huni di melalui survei yang dilakukan pemerintah desa itu sendiri yang kemudian di musyawarahkan bersama BPD(Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat baik perwakilan seperti ketua RT ataupun ketua RW dan juga kader- kader organisasi Desa yang terlibat. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Slamet selaku ketua BPD, dalam proses wawancaranya beliau mengatakan:

“Contoh Renovasi rumah tidak layak huni, ini sudah beberapa rumah yang sudah direnovasi, selain dari Dinas Sosial, APBDes ada sumber dana dari PWD (Paguyuban Wong Dermaji) pengururnya sekarang di Jakarta.”⁷⁵

Dari hasil observasi dan wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa, Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji di bidang pelayanan sosial perumahan, ini diwujudkan dalam dua bentuk yaitu air bersih yang dialirkan ke rumah- rumah warga dan renovasi rumah tidak layak huni yang hampir di laksanakan setiap satu tahun sekali.

b. Bidang Kesehatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku Ketua BPD , pada tanggal 23 September 2019

Di bidang kesehatan Pemerintah Desa Dermaji memberikan beberapa pelayanan, diantaranya; melalui Posyandu dan poliklinik baik itu berupa cek kesehatan gratis ataupun sosialisasi kesehatan, hal ini sesuai dengan yang dikatakan beliau bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji dalam wawancara ,mengatakan:

“Jika dikelompokan kebidang- bidangnya, kesehatan tadi ada; cek kesehatan gratis melalui posyandu, sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan melalui PKK.”⁷⁶

Dalam wawancara lain dengan narasumber yang berbeda juga menyebutkan bahwa pelayanan di bidang kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan anak dan kesehatan orang dewasa atau lansia. Adapun dalam pelayannya untuk kesehatan anak di laksanakan oleh ibu PKK melalui posyandu dengan seperti; imunisasi balita, sosialisasi gizi anak dan penyuluhan *stunting*. Untuk kesehatan lansia ada diadakan cek kesehatan gratis yang dikoordinasikan dengan bidan Desa yang ada di PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Karsinem selaku kader PKK yang aktif di posyandu dan juga pospaud, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Iyah untuk kesehatan paling kita ikut kegiatan- kegiatan posyandu di desa dermaji ada 7 posyandu, ada imunisasi balita, ada sosialisasi kesehatan gizi, ada penyuluhan *stunting* yang kemarin itu pake alat pengukuran/ pencarian anak *stunting* dan kegiatan itu biasanya setiap satu bulan sekali terus ada yang tiga bulan sekali.”⁷⁷

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Karsinem selaku kader PKK dan menjabat sebagai Bendahara , pada tanggal 23 September 2019

Pelayanan sosial dibidang kesehatan ini juga direalisasikan oleh Pemerintah Desa melalui PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) dan Puskesmas Pembantu. Dimana dari lembaga tersebut melakukan berbagai pelayanan kesehatan, seperti pengobatan bagi pasien yang ada di Desa Dermaji, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau bapak hasil wawancara dengan bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, dalam wawancara, mengatakan:

”Kemudian di bidang kesehatan kita ada posyandu, PKD (poliklinik Kesehatan Desa) dan juga desa siaga. Semisalkan kasus gisi buruk peran peran kader di lembaga disini menjadi penting, kader langsung mengidentifikasi, dan kemudian langsung berkordinasi dengan puskesmas atau bidan desa.”⁷⁸

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan sosial Pemerintah Desa di bidang kesehatan ini di bagi ke dua lembaga yang ada di Desa, melalui Posyandu oleh PKK dan PKD, adapun bentuk pelayanannya, meliputi: pengobatan dan sosialisasi kesehatan anak dan dewasa.

c. Bidang Pendidikan

Pemerintah Desa Dermaji memberikan sebuah pelayanan dibidang pendidikan berupa, pos PAUD, TK, Perpustakaan Desa dan Musium Naladipa sebagai pusat edukasi sejarah Desa Dermaji itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan beliau bapak Harry

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji dalam wawancara ,mengatakan:

“Kemudian bidang pendidikan, ada Pos Paud, TK, perpustakaan Desa, dan musium naladipa. Di bidang ekonomi juga kita melaksanakan pelatihan pembudidayaan ikan, yang tujuannya lebih ke peningkatan swasembada pangan masyarakat, kita memakai bioflog fasilitas gratis dari desa untuk masyarakat, kendalanya karena kita di daerah ketinggian kalau musim seperti ini airnya susah, tapi setidaknya ini menjadi langkah kami untuk memberikan pelayanan peningkatan kapasitas SDM terkait UMKM yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dibidang kebudayaan juga kami memberikan ruang kepada kelompok budaya untuk melastarikan kebudayaan ini.”⁷⁹

Dalam wawancara lain oleh narasumber ibu Karsinem selaku guru disalah satu PAUD dan juga sebagai kader PKK, mengatakan:

“Kami sebagai pegiat PKK memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan yaitu pos Paud yang terdiri dari 7 Pos Paud, kebetulan kami menjadi tenaga pengajar di pos paud “Larasati RW 03 Desa Dermaji”. Kalo untuk satu kecamatan ada 24 pos paud dan terhimpun dalam HIMPAUDI atau himpunan paud, untuk didesa dermaji ada di RW 1 pos paud Rahayu, RW 2 pos paud Sri Rejeki, RW 3 pos paud Larasati, RW 4 RW5 saya lupa namanya hhehe, pos paud Tunas Harapan RW 6 kalo engga salah, terus RW 7 pos paud Mekarsari. Pembentukannya serentak di tahun 2009, untuk tenaga pengajar setiap pos paud ada yang 4 ada yang 5 guru, untuk kegiatan mengajar dimulai dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10, kalo untuk hari ada yang senin sampai jumat, ada juga yang sampai kamis. Kebetulan di pos paud “Larasati RW 03 Desa Dermaji” ada 14 siswa yang usianya 4 tahun, ada satu yang usianya 3 tahun.”⁸⁰

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dibidang pendidikan pelayanan yang dilaksanakan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Karsinem selaku kader PKK dan menjabat sebagai Bendahara , pada tanggal 23 September 2019

Pemerintah Dermaji berupa; perpustakaan jagad aksara, Pos PAUD, TK, dan Musium Naladipa.

3. Fungsi dan Faktor pendukung Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji

Pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji merupakan representatif dari tugas Pemerintah Desa itu sendiri, dengan mengedepankan 3 prinsip kerjanya yaitu; partisipasi, transparasi dan akuntabilitas. Sehingga angka keberhasilan sebuah pelayanan tersebut lebih tinggi dibanding kendala maupun kegagalan dalam pelaksanaannya, seperti yang disampaikan beliau bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji dalam wawancara yang berlangsung, mengatakan:

“Tentunya kita tetap mengedepankan 3 hal penting yaitu; partisipasi, transparasi dan akuntabilitas, cuma itu saja dan kita tingkatkan itu yang kemudian didukung dengan teknologi dan informasi. Faktor pendukung ya tentu tersedianya SDM, sarana prasarana. Sedangkan kesulitan kami mungkin untuk merubah visi masyarakat, karena persoalan kesejahteraan tidak hanya soal infrastruktur melainkan kesehatan dan pendidikan atau yang lainnya sangat penting. Jadi disini yang menjadi tantangan bagaimana merubah pola pikir masyarakat itu sendiri.”⁸¹

Setiap pelaksanaan pelayanan sosial tentu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa menyebutkan tujuan mereka dalam melaksanakan sebuah pelayanan baik dibidang perumahan, pendidikan maupun kesehatan, dalam wawancara beliau bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji menyebutkan:

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

“Tujuannya mensejahterahkan masyarakat, kesejahteraan sebenarnya dimensinya banyak tidak hanya masalah ekonomi saja. Seperti contoh ibu yang hamil kemudian melahirkan, menyusui hingga mendidik anak, itu semua mencakup kesejahteraan. Dan juga seperti akutualisasi terhadap kesenian budaya dimana indikator masyarakat dikatakan sejahtera ketika masyarakat sudah menikmati kesenian.”⁸²

Dan wawancara lain dengan beliau bapak Harry Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji menyebutkan beberapa faktor pendukung dan menghambat dari sebuah pelaksanaan pelayanan sosial yaitu :

“Faktor pendukung di desa tentu kepala desa karena merupakan sebagai figur akhir untuk menyelesaikan masalah, menerima aduan masyarakat dan sebagai leader dalam menetapkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan sosial. Kalau penghambat menurut saya tidak terlalu, hambatannya menurut saya mungkin di anggaran yang belum menjangkau ke semua aspek dari program pelayanan sosial.”⁸³

Sedangkan keterkaitan semua elemen masyarakat pun menjadi faktor seperti halnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentu disini juga sangat berperan, yaitu dalam hal pengawasan sebuah program pelayanan yang diusung oleh Pemerintah Desa, kemudian di laksanakan oleh lembaga- lembaga Desa yang terlibat, dalam hal ini sesuai dengan penyampaian beliau bapak Slamet selaku Ketua BPD sejak tahun 2000, dalam wawancara beliau mengatakan:

“Terus disamping itu kami terlibat sebagai fungsi legalitas, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap kinerja jalannya pemerintahan desa, setiap ada program dan momen- momen dari desa kami selalu diikutsertakan. Ikut merencanakan sebuah rencana program yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan itu, kemudian kita mengawal bagaimana program itu dilaksanakan atau

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Setyo Nugroho selaku Kepala Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Hary Haryono Caryono selaku Sekertaris Desa Dermaji, pada tanggal 10 September 2019

tidak otomatis disitu fungsi pengawasannya, kemudian kami menggali setiap informasi- informasi usulan masyarakat keinginan masyarakat dalam hal sosial masyarakat kemudian kami tampung dan di sampaikan ketika didalam musyawarah, jadi keterlibatann BPD mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan pelayanan.”⁸⁴

Dari hasil observasi dan wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap upaya pelayanan yang terencana dan didukung dari setiap elemen masyarakat menjadi hal yang harus ada dan dilaksanakan bagi setiap komunitas, lembaga, organisasi ataupun individu itu sendiri. Pemerintah Desa Dermaji merupakan lembaga pemerintahan dengan pelayanan sosial ditingkat “baik”, hal ini juga yang dijadikan alasan peneliti menjadikan objek penelitiannya.

C. ANALISIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

1. Karakteristik Pelayanan Sosial Pemerintah Desa

Pelayanan Sosial Pemerintah Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelayanan publik, ditinjau dari segi pelaksana yaitu pelayanan publik adalah segala bentuk jasa ataupun barang publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan yang bersinggungan dengan keseluruhan populasi

⁸⁴. Hasil wawancara dengan bapak Slamet selaku Ketua BPD desa Dermaji, pada hari senin, tanggal 23 September 2019

penduduk.⁸⁵ Sedangkan pelayanan sosial Pemerintah Desa sendiri berbeda, tentu dilakukan oleh organisasi Desa bukan instansi pemerintahan, dan berorientasi mensejahterahkan masyarakat tertentu, adapun kategori masyarakat yang kemudian menerima pelayanan juga berbeda, misal bentuk pelayanan perumahan, seperti rumah tidak layak huni dan air bersih, tidak semua masyarakat mendapatkannya, di Desa Dermaji kategori ini hanya di peruntukan oleh masyarakat yang tidak mampu atau menjangkau sumber mata airnya sendiri.

Dan begitu juga dengan bentuk- bentuk pelayanan sosial lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, itu juga memiliki sasaran sendiri- sendiri. Tentu dilakukan bukan oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah

2. Kebijakan Pemerintah Desa dan Pelayanan Sosial

Spicker dan Thompson. Secara tradisi kebijakan sosial mencakup ketentuan atau regulasi pemerintah mengenai lima bidang pelayanan sosial, yaitu: jaminan sosial, pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan atau perawatan sosial personal.⁸⁶ Namun Pemerintah Desa Dermaji tidak ada pelayanan di bidang jaminan sosial dan perawatan sosial personal karena biasanya di jalankan oleh lembaga tertentu, seperti jaminan sosial yang melaksanakannya biasanya Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian pelayanan sosial bidang perawatan sosial personal terlaksana dilembaga lain seperti bentuk Peradilan kriminal (*criminal*

⁸⁵ Alamsyah Alamsyah, *Karakteristik universal Pelayanan Publik*, diambil dari <http://www.researchgate.net/publication/277194649>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 . hlm 357

⁸⁶ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Alfabeta, Bandung : 2007) hlm.156

justice) oleh Lembaga Permasalahatan. Pemerintah Desa Dermaji melaksanakan pelayanan sosial bagi masyarakatnya, terbagi menjadi tiga di bidang pelayanan perumahan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Pelayanan sosial dianggap sebagai fungsi dari perjalanan kebijakan suatu negara yang mana negara secara khusus melibatkan program- program pelayanan sosial bagi kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu orang yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial seperti keluarga miskin, anak terlantar pekerja anak dan kelompok-kelompok lainnya.⁸⁷

Bentuk- bentuk pelayanan sosial yang di selenggarakan Pemerintah Desa Dermaji memiliki hubungan erat dengan kebijakan, artinya dalam usaha- usaha mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga maupun kelompok harus melalui sumber- sumber sosial individu, keluarga dan kelompok itu sendiri, dan juga adanya proses- proses yang meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan ataupun kelompok itu sendiri.

Dalam hal ini kebijakan pemerintah desa berperan sebagai pemegang kendali antara di setuju atau tidaknya sebuah pelaksanaan pelayanan tersebut. Sebagai contoh terbentuknya regulasi pengadaan air bersih di bidang pelayanan perumahan, melalui MusDes (Musyawarah Desa) yang melibatkan masyarakat dari berbagai elemen, sehingga

⁸⁷ Ari Sugeng Martopo, (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)Hlm.19

gagasan tentang pengadaan air bersih ini muncul, yang kemudian dicatat atau di sahkan didalam APBDes (Aangaran Pemasukan Belanja Desa).

Adapun regulasi yang berbentuk pelayanan sosial ini terbagi menjadi tiga bidang, diantaranya:

- d. Bidang Pelayanan Perumahan, meliputi; air bersih yang dialirkan kesetiap rumah warga Desa Dermaji dan pembangunan/ renovasi terhadap RTLH (rumah tidak layak huni).
- e. Bidang Kesehatan, meliputi; sosialisasi gizi anak, penyuluhan bayi *Stunting*, Sosialisasi kesehatan, Perawatan medis masyarakat (*medical care*).
- f. Bidang Pendidikan, meliputi; pendidikan anak usia dini, perpustakaan Desa “jagad aksara” dan musium Desa “naladipa”.

3. Strategi Pelayanan Sosial Pemerintah Desa

Keberhasilan usaha- usaha pelayanan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Desa Dermaji tidak lepas dari strategi yang baik, Pemerintah Desa Dermaji selalu memegang tiga prinsip diantaranya; partisipatif, transparatif dan akuntabilitas.

Pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji dalam pelaksanaanya memiliki beberapa tahapan, untuk tahap *pertama* ini adalah identifikasi masalah, dalam hal ini Pemerintah Desa Dermaji menerima aduan dari masyarakat berupa persoalan- persoalan yang dihadapi mereka, juga adanya persoalan- persoalan yang muncul dari luar kemudian memiliki pengaruh terhadap pihak yang ada di dalam (Masyarakat Desa Dermaji).

Kedua berupa pencarian gagasan, pengusungan sebuah masalah ke dalam sebuah forum dengan melibatkan masyarakat dan elemen- elemen lain seperti lembaga, MusDes merupakan wadah diskusi dalam pencarian gagasan, usulan- usulan dan ide ide ditampung dan kemudian dianalisa, ini merupakan perwujudan dari prinsip partisipasi.

Ketiga perencanaan, setelah gagasan diterima dan di analisa dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah Desa Dermaji merencanakan program pelayanan sosial yang kemudian dicatatkan kedalam APBDes, disinilah prinsip transparasi berfungsi agar tidak ada kesalah pahaman yang terjadi oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa.

Keempat adalah pelaksanaan, membangun kerjasama dengan lembaga- lembaga yang ada di Desa sangat diperlukan, menunjuk pelaksana program pelayanan sosial kepada lembaga yang terkait adalah wewenang Pemerintah Desa. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, setiap pelayanan sosial dilaksanakan oleh kader atau lembaga sesuai dengan bidangnya seperti, pelayanan perumahan berupa air bersih yang dialirkan kerumah- rumah warga dikelola oleh BUMdes Aji Mandiri.

Dan *kelima* adanya pengawasan dan evaluasi, fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan mengawasi jalannya pemerintahan Desa, sebagaimana usaha- usaha pelayanan sosial yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat Desa tidak menyimpang, yang kemudian setiap usaha ataupun program pelayanan sosial yang dilaksanakan dapat di evaluasi.

Adapun strategi dari masing- masing bentuk pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pelayanan Perumahan, meliputi; air bersih yang dijalankan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) “Aji Mandiri” bekerja sama dengan Pamsimas, perencanaan untuk program ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000, yang kemudian terus dijalankan guna kebutuhan air bersih warga didaerah dataran tinggi tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari pinggiran- pinggiran jalan dan rumah warga yang banyak terdapat pipa- pipa untuk mengaliri air kerumah warga, dan pembangunan/ renovasi terhadap RTLH (rumah tidak layak huni) yang dilaksanakan setiap tahun sekali, perencanaan program ini melalui musyawarah Desa satu tahun sebelum pelaksanaan, yang kemudian di catatkan kedalam APBDes, pelaksanaan ini selain dari APBDes juga ada dari organisasi Desa yaitu PWD (Paguyuban Wong Dermaji) yang berada di perantauan, setiap tahun bahkan tiga bulan sekali menganggarkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang ada didesa.
- b. Bidang Kesehatan, meliputi; sosialisasi gizi anak, penyuluhan bayi *Stunting*, Sosialisasi kesehatan, Perawatan medis masyarakat (*medical care*) itu semua dilaksanakan melalui PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) yang bekerjasama dengan Bidan Desa dan juga organisasi Desa PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) dan bentuk- bentuk pelayanan kesehatan tersebut di wujudkan melalui program Posyandu

dan Poslansia. Perencanaan pelayanan ini semua adalah wujud pelayanan sosial dasar oleh Pemerintah Desa, tentu melalui musyawarah Desa atau yang dikenal dengan “Musrenbangdes” yang melibatkan semua elemen masyarakat, selain itu pelaksanaan bentuk-bentuk pelayanan sosial bidang kesehatan ini juga terbentuk melalui dorongan pemerintah pusat.

- c. Bidang Pendidikan, meliputi; pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, perpustakaan Desa “jagad aksara” dan musium Desa “naladipa”. Bentuk pelayanan sosial bidang kesehatan yang terlaksanan di Desa Dermaji juga menjadi bentuk layanan sosial dasar atau layanan yang harus tersampaikan kepada masyarakatnya. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) ini melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan, pelaksanaannya terbentuk sejak tahun 2009 yang sekarang berjumlah PAUD ada 7 dan TK ada 3. Berbeda dengan perpustakaan Desa dan musium Desa, perencanaan hingga pelaksanaan ini adalah dorongan dari Pemerintah Desa itu sendiri yang dalam hal ini bertujuan sebagai pendukung sarana prasarana pelayanan sosial Pemerintah Desa tentu di bidang pendidikan.

4. Fungsi Pelayanan Sosial bagi Masyarakat Desa

Sebagaimana di sebutkan diatas bahwa pelayanan sosial itu merupakan fungsi dari kebijakan, wujud seseorang sebagai pemegang kebijakan adalah Bapak Bayu Setyo Nugroho merupakan seorang *leader*

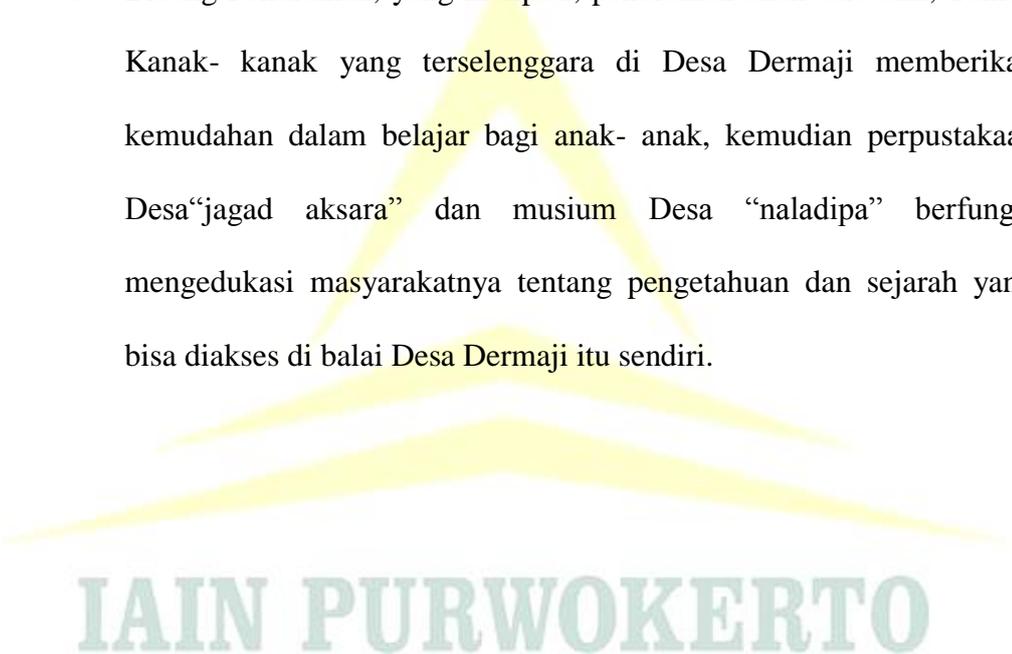
atau Kepala Desa Dermaji, beliau sudah hampir 3 periode terpilih yaitu mulai sejak tahun 2005 sampai nanti di tahun 2023, pelaksanaan pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji memberikan kepuasan bagi penerimanya. SDM (Sumber Daya Manusia) masyarakat Desa Dermaji meningkat seiring dengan Usaha pelayanan- pelayanan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini tujuan usaha pelayanan sosial ini merubah, meningkatkan dan menguatkan keberfungsian masyarakat itu sendiri dibuktikan dengan partisipasi masyarakat yang sangat responsif terhadap usaha pelayanan sosial pemerintah Desa Dermaji.

Selain itu prinsip yang dipegang Pemerintah Desa diantaranya; partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terbukti dari sebuah prestasi yang diraih. Adapun fungsi- fungsi dari bentuk pelayanan sosial bagi masyarakat Desa Dermaji diantaranya:

- a. Bidang Pelayanan Perumahan, keberfungsian air bersih yang dialirkan kesetiap rumah warga Desa Dermaji tentu mempermudah pekerjaan rumah tangga seperti mandi, mencuci, masak, berladang dan lain sebagainya. Dan pembangunan/ renovasi terhadap RTLH (rumah tidak layak huni) juga memberikan dampak positif bagi keluarga kurang mampu atau bahkan keluarga miskin, mereka merasakan nyaman juga aman dalam beristirahat dan aktifitas didalam rumah.
- b. Bidang Kesehatan, berfungsi meliputi; sosialisasi gizi anak dan penyuluhan bayi *Stunting*, hal ini mengedukasi seorang ibu agar lebih

memperhatikan kesehatan gizi anaknya, kemudian sosialisasi kesehatan bagi lansia juga menjadi edukasi agar dapat memperhatikan kesehatan diri dengan cara hidup lebih sehat, kemudian Perawatan medis masyarakat (*medical care*) yang disediakan oleh Pemerintah Desa dengan adanya PKD (Poliklinik Kesehatan Desa) tentu memudahkan masyarakat Desa Dermaji dalam melakukan pengobatan.

- c. Bidang Pendidikan, yang meliputi; pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak yang terselenggara di Desa Dermaji memberikan kemudahan dalam belajar bagi anak-anak, kemudian perpustakaan Desa “jagad aksara” dan museum Desa “naladipa” berfungsi mengedukasi masyarakatnya tentang pengetahuan dan sejarah yang bisa diakses di balai Desa Dermaji itu sendiri.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumass, maka peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; strategi usaha pelayanan sosial oleh pemerintah Desa, bahwasannya memegang sebuah kunci yang sesuai akan membukakan pintu yang sesuai juga, antara lain; partisipasi dari berbagai elemen masyarakat menjadi kunci awal dalam keberhasilan sebuah usaha pelayanan tersebut, transparansi pemerintah Desa menjadi kunci kedua, kemudian akuntabilitas juga menjadi kunci ketiga. Dari ketiga kunci tersebut harus selalu dipegang erat- erat.

Bentuk- bentuk pelayanan yang di laksanakan Pemerintah Desa Dermaji, meliputi bidang pelayanan perumahan; air bersih dan renovasi rumah tidak layak huni, kesehatan; pengobatan melalui poliklinik dan sosialisasi Gizi anak melalui Posyandu, pendidikan; Perpustakaan Desa, museum Naladipa dan Pendidikan Anak Usia Dini melalui PosPaud dan TK.

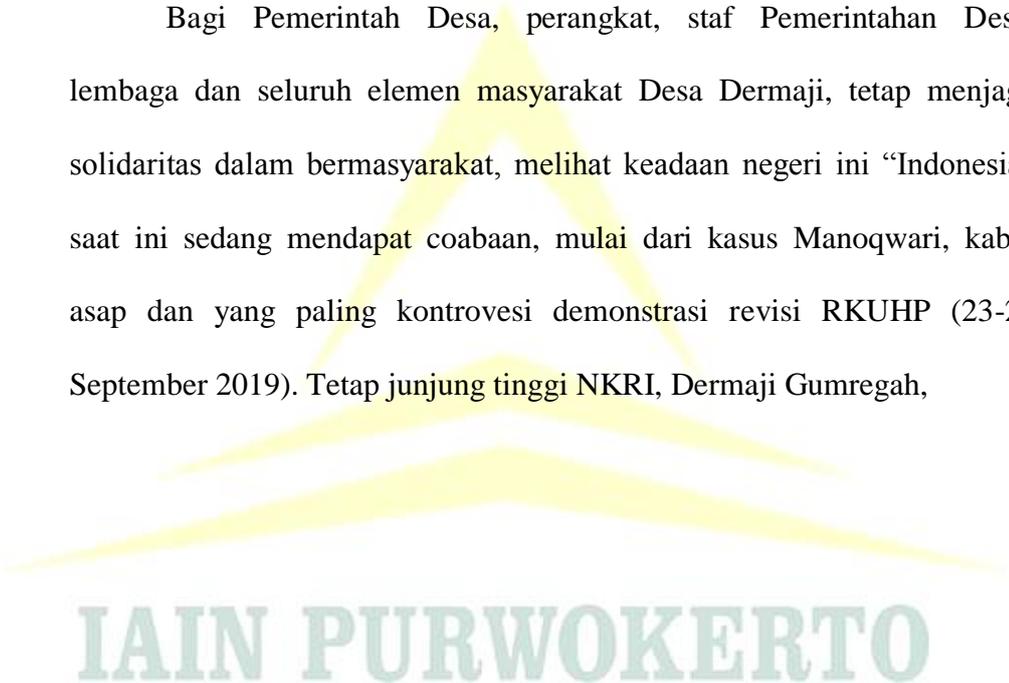
Keberfungsian sosial masyarakat sebagai tujuan dari usaha pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji, hal ini telah dibuktikan selain dari prestasi juga dari responsif masyarakat terhadap usaha pelayanan

sosial pemerintah Desa itu sendiri dan juga meningkatnya SDM masyarakat melalui bukti pelayanan publik yang inovatif.

B. SARAN

Proses penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menjadi dorongan peneliti memberikan saran, saran yang mungkin akan disampaikan berupa doa dan harapan, terutama bagi pihak- pihak yang tarlibat dengan penelitian ini.

Bagi Pemerintah Desa, perangkat, staf Pemerintahan Desa, lembaga dan seluruh elemen masyarakat Desa Dermaji, tetap menjaga solidaritas dalam bermasyarakat, melihat keadaan negeri ini “Indonesia” saat ini sedang mendapat coabaan, mulai dari kasus Manoqwari, kabut asap dan yang paling kontrovesi demonstrasi revisi RKUHP (23-27 September 2019). Tetap junjung tinggi NKRI, Dermaji Gumregah,



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2015. *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Pembangunan Perdesaan (pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikuntoro, Suharsimi. 1993. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damanik, Janianton, 2011. Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan, *jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 15, Nomor 1, Juli 2011 (1-14) ISSN 1410-4946, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Diambil dari: https://www.researchgate.net/publication/235351498_Menuju_Pelayanan_Sosial_yang_Berkeadilan. Diakses pada tanggal: 26 November 2018, Jam : 09.18 WIB.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahrudin, Adi, 2012. *Pengantar kesejahteraan sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Greene, Albert, Robert, Gilbert, 2009. *Pekerjaan sosial (Social Workers' Desk Reference)*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Husna, Nurul, Ilmu Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial, *Jurnal Al-Bayan* Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014, diambil dari : <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> Diakses pada Tanggal 25 Juni 2019, pukul 09:30 WIB.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero, 2016. *Community Development: Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kartono, Kartini, 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- K. Rangga, kardiya dan Sumaryo Gitasaputra, 2015. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori Dan Aplikasinya Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Martopo, Ari Sugeng, 2015. (Efektivitas Pelayanan Sosial Bagi Klien Alumni Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Tahun 2012-2014). *Skripsi*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Diambil dari: <http://digilib.uin-suka.ac.id/16855/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam. 17:00 WIB.

Masduki, Lutfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing.

Musfiroh, Tursina Intan, 2015. (Implementasi Program Balai Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga). *Skripsi*, Semarang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Diambil dari: <http://lib.unnes.ac.id/20229/1/1201411074-s.pdf>. diakses pada tanggal : 26 November 2018, jam. 15 :00 WIB.

Pujileksono, Sugeng, 2016. *Perundang- undangan sosial dan Pekerjaan Sosial*, Malang : Setara Press.

Pamungkas, Erna Kurniawati, 2011. Peran Serta Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Kalasan Tahun. *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. diambil dari : <http://eprints.uny.ac.id>. diakses pada hari rabu 26 Juni 2019 pukul 09:25 WIB.

Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Solekhan, Moch, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press.

Solekhan, Moch , 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Press.

Soehartono, Irawan, 2000. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, Sumadi, 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharto, G.Didik 2016. *Membangun Kemandirian Desa*, (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 sertaperspektif UU No. 6/2014) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi, 2007. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung : Alfabeta.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diambil dari: <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>, diakses pada tanggal 27 november 2018, jam : 20:12 WIB.

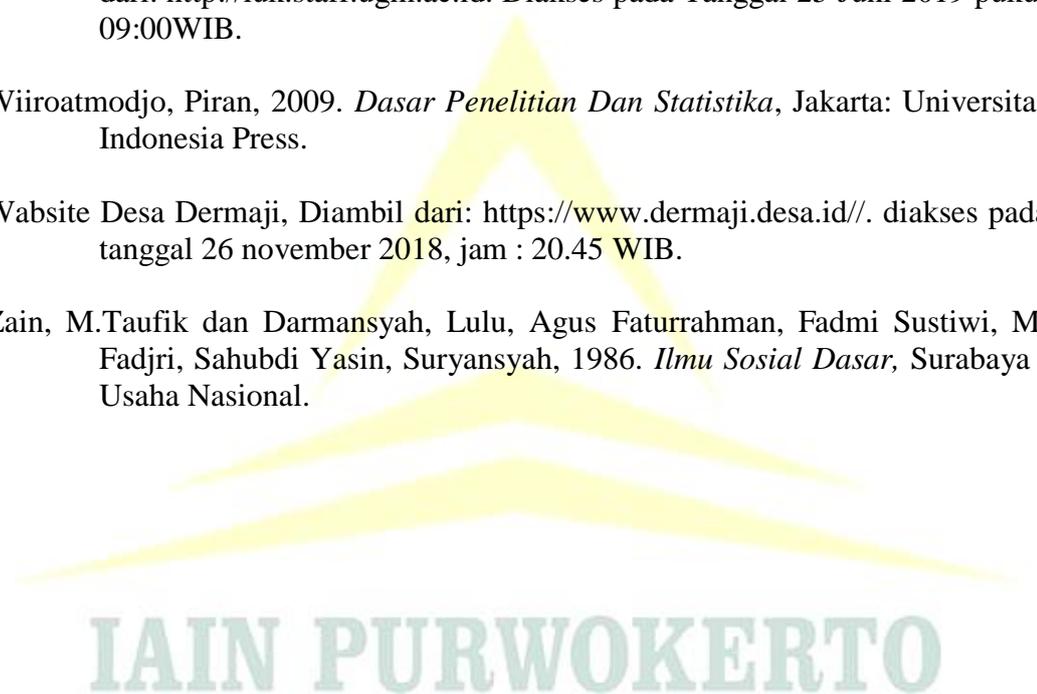
Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa diambil dari: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf. pada tanggal 27 november 2018, jam : 21:12 WIB.

Undang- Undang Nomer 11 Tentang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009. , diambil dari: <http://luk.staff.ugm.ac.id>. Diakses pada Tanggal 25 Juni 2019 pukul 09:00WIB.

Wiiroatmodjo, Piran, 2009. *Dasar Penelitian Dan Statistika*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wabsite Desa Dermaji, Diambil dari: <https://www.dermaji.desa.id/>. diakses pada tanggal 26 november 2018, jam : 20.45 WIB.

Zain, M.Taufik dan Darmansyah, Lulu, Agus Faturrahman, Fadmi Sustiwi, M. Fadjri, Sahubdi Yasin, Suryansyah, 1986. *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya : Usaha Nasional.



IAIN PURWOKERTO

PANDUAN WAWANCARA

Narasumber : Bayu Setyo Nugroho, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : Kepala Desa Dermaji

1. Seperti apa profil dan sejarah Desa Dermaji?
2. Apa program yang sudah terselenggara di Desa Dermaji terkait dengan kebijakan pemerintah Desa?
3. Apakah ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan Pelayanan Sosial?
4. Adakah masalah sosial masyarakat Desa Dermaji ?
5. Tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji Untuk Mengatasi masalah sosial tersebut?
6. Bagaimana dengan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?
7. Apa saja faktor yang mendukung pelayanan sosial?
8. Apa tujuan dari pelayanan sosial?
9. Apa saja persiapan didalam Pelayanan Sosial kepada Masyarakat ?
10. Apa bentuk- bentuk Pelayanan Sosial yang diselenggarakan di Desa Dermaji ?
11. Apa saja strategi yang digunakan dalam pelayanan sosial?
12. Apakah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial terdapat kendala?
13. Adakah kerjasama- kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya dalam proses pelayanan sosial tersebut?
14. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?

15. Sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Desa Dermaji dalam melaksanakannya, khususnya pelayanan sosial?
16. Apa saja faktor pendukung pelayanan sosial di pemerintah desa Dermaji kecamatan lumir kabupaten banyuma ?
17. Apa saja faktor penghambat pelayanan sosial di pemerintah desa Dermaji kecamatan lumir kabupaten banyuma?
18. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **jaminan sosial**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
19. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **kesehatan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
20. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **pendidikan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
21. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **perumahan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
22. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **pelayanan sosial personal**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Narasumber : Hary Haryono Caryono, A.Md.

Jabatan : Sekertaris Desa Dermaji

23. Seperti apa profil dan sejarah Desa Dermaji?
24. Apa program yang sudah terselenggara di Desa Dermaji terkait dengan kebijakan pemerintah Desa?
25. Apakah ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan Pelayanan Sosial?

26. Adakah masalah sosial masyarakat Desa Dermaji ?
27. Tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji Untuk Mengatasi masalah sosial tersebut?
28. Bagaimana dengan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?
29. Apa saja faktor yang mendukung pelayanan sosial?
30. Apa tujuan dari pelayanan sosial?
31. Apa saja persiapan didalam Pelayanan Sosial kepada Masyarakat ?
32. Apa bentuk- bentuk Pelayanan Sosial yang diselenggarakan di Desa Dermaji ?
33. Apa saja strategi yang digunakan dalam pelayanan sosial?
34. Apakah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial terdapat kendala?
35. Adakah kerjasama- kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya dalam proses pelayanan sosial tersebut?
36. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?
37. Sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Desa Dermaji dalam melaksanakannya, khususnya pelayanan sosial?
38. Apa saja faktor pendukung pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan lumbir kabupaten banyuma ?
39. Apa saja faktor penghambat pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan lumbir kabupaten banyuma?
40. Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **jaminan sosial**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

41. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **kesehatan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
42. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **pendidikan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
43. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **perumahan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?
44. Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **pelayanan sosial personal**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Narasumber : Ibu Maisaroh, S.Pd.

Jabatan : Masyarakat Desa Dermaji

45. Bagaimana dengan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?
46. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?

Narasumber : Bapak Slamet

Jabatan : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

47. Bagaimana kinerja PemDes Dermaji dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi masyarakatnya dikaca BPD?
48. Bagaimana keterlibatan antara BPD dengan Pelayanan Sosial di Desa Dermaji?

Narasumber : Ibu Karsinem

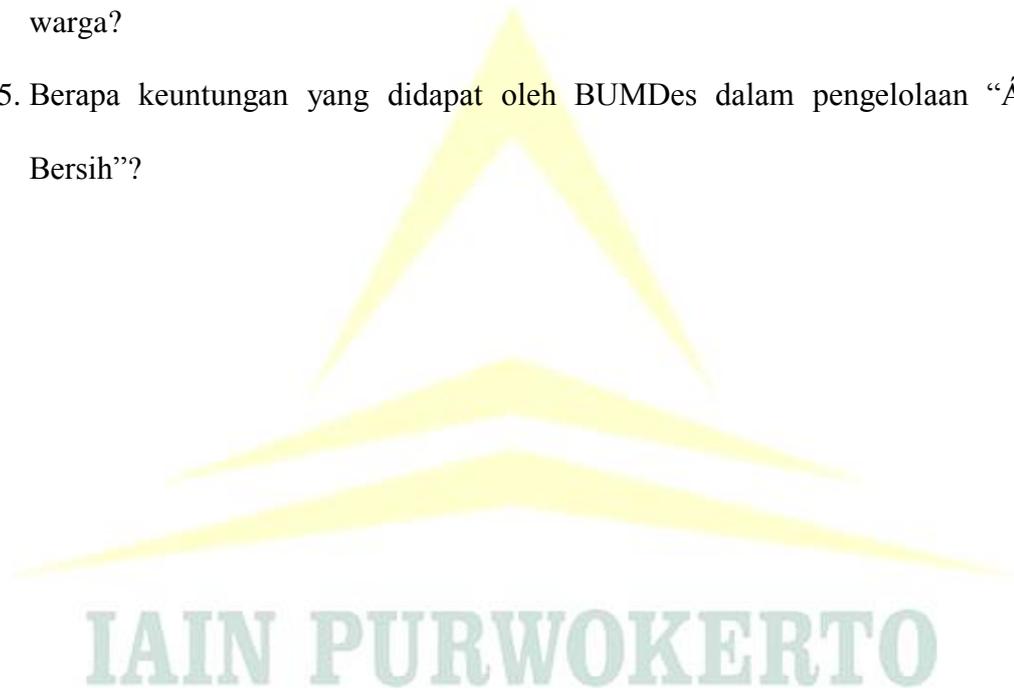
Jabatan : pengurus PKK Desa

49. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dibidang Pendidikan?
50. Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dibidang Kesehatan?

Narasumber : Bapak Haryono

Jabatan : Ketua BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dermaji

51. Bagaimana dengan proses pelayanan sosial PemDes Dermaji?
52. Apa saja keterlibatan BUMDes dengan Pelayanan Sosial PemDes Dermaji?
53. Bagaimana bentuk dari Pelayanan Sosial berupa “Air bersih” yang dikelola oleh BUMDes?
54. Adakah kendala dalam memberikan/ mengelola “Air Bersih” kerumah- rumah warga?
55. Berapa keuntungan yang didapat oleh BUMDes dalam pengelolaan “Air Bersih”?



Narasumber : Bayu Setya Nugroho

Jabatan : Kepala Desa Dermaji

Script : wawancara

Seperti apa profil dan sejarah Desa Dermaji?

Saya rasa sudah tertuang jelas di website desa.id, anda bisa langsung mengutipnya.

Apa saja program yang sudah terselenggara di Desa Dermaji terkait dengan kebijakan pemerintah Desa?

Untuk program sendiri sebenarnya sangat banyak, dan itu kita rekam atau kita catat dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa) dan RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang bersifat 1 tahun kedepan, program- program itu ratusan di empat bidang; bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan pemyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dari semua program tersebut terlahir dari masyarakat.

Sebenarnya isi RPJMDes itu merupakan isi tentang visi misi desa, kemana dan bagaimana desa akan dibawa, semisal dibidang pembangunan; kita kepingin jalannya bagus, ingin ada sanggar seni, ingin ada perpustakaan misalnya, dan lain- lain semua yang tertuang didalam RPJMDes.

Apakah ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan Pelayanan Sosial?

Semua arah program sebenarnya mengarah kesitu, misalkan perbaikan jalan untuk peningkatan percepatan ekonomi, dan juga air bersih untuk peningkatan kebutuhan juga yang kami alirkan kesetiap rumah- rumah warga yang kemudian

dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Posyandu dan poliklinik dibidang kesehatan. PAUD desa dan perpustakaan itu juga masuk kepeelayanan sosial dibidang pendidikan.

Adakah masalah sosial di lingkungan masyarakat Desa Dermaji?

Kalo untuk masalah sosial sendiri itu tentu ada, seperti kemiskinan, kemudian *stunting* atau bayi kerdil, pendidikan juga termasuk, makanya kami adakan PAUD (Pendidikan anak usia dini).

Tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji Untuk Mengatasi masalah sosial tersebut?

Upaya ini kita lakukan dalam banyak hal, pertama insfrastukturnya kita siapkan, yang kedua dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat kita adakan pelatihan- pelatihan manajemen keuangan rumah tangga misalkan, untuk pegiat usaha, peternak juga kita senantiasa melaksanakan pelatihan- pelatihan, kaya disini kambing kan banyak kita adakan pelatihan bagaimana budidaya kambing yang bagus,dan kita kemudian adakan festival kambing dermaji. Dan disitu upaya kita pemerintah Desa melakukan pelayanan di bidang SDM untuk selalu ditingkatkan. Juga tidak hanya untuk peternak, pertanian juga kita adakan seperti pelatihan- pelatihan kepada kelompok tani.

Bagaimana dengan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?

Kita ada lembaga- lembaga Desa yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, seperti terkait dengan administrasi langsung ke pemerintah desa, lembaga lain seperti pos paud, perpustakaan desa dibidang pendidikan, kemudian di bidang kesehatan kita ada posyandu, poli klinik dan juga desa siaga.

Semisalkan kasus gisi buruk peran peran kader di lembaga disini menjadi penting, kader langsung mengidentifikasi, dan kemudian langsung berkordinasi dengan puskesmas atau bidan desa.

Apa saja faktor yang mendukung pelayanan sosial?

Ketersediaan SDM, dimana mereka kader- kader yang tidak digajih tetapi memiliki kesemangatan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu didukung juga dari anggaran desa yang lebih baik dari sebelumnya. Juga adanya sarana prasarana yang cukup, seperti gedung posyandu, pos paud.

Apa tujuan dari pelayanan sosial?

Tujuannya mensejahterahkan masyarakat, kesejahteraan sebenarnya dimensinya banyak tidak hanya masalah ekonomi saja. Seperti contoh ibu yang hamil kemudian melahirkan, menyusui hingga mendidik anak, itu semua mencakup kesejahteraan. Dan juga seperti akutualisasi terhadap kesenian budaya dimana indikator masyarakat dikatakan sejahtera ketika masyarakat sudah menikmati kesenian.

Apa saja persiapan didalam Pelayanan Sosial kepada Masyarakat ?

Pelayanan sosial di Desa kita awali dari penggalian gagasan, kebutuhan masyarakat yang direncanakan. Kemudian dilaksanakan dari pelaksanaan itu kita menggandeng semua elemen, unsur- unsur itu yang bisa mendukung kita libatkan.

Apa bentuk- bentuk Pelayanan Sosial yang diselenggarakan di Desa Dermaji ?

Seperti yang sudah dijelaskan diawal itu semua menjadi wujud kerja pemerintah Desa melaksanakan pelayanan sosial, seperti insfrastruktur pembangunan rumah

tidak layak huni setiap tahun, pos paud, posyandu, perpustakaan jagad aksara, museum naladipa, air bersih, pelatihan budidaya kambing,

Apa saja strategi yang digunakan dalam pelayanan sosial?

Dalam hal ini tentu kita berangkat dari masyarakat, mulai dari penggalian informasi atau masalah, yang kemudian dalam pelaksanaannya kita menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi

Apakah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial terdapat kendala?

Kalo untuk kendala sih kayaknya relative tidak ada. Karena memang dari sejak awal kita sudah diatur dan direncanakan dengan matang

Adakah kerjasama- kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya dalam proses pelayanan sosial tersebut?

Dari beberapa kasus ada, kita gandeng dengan LSM dan Universitas seperti pelaksanaan pelatihan- pelatihan yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia itu tadi.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?

Baik, dan memang kita buka seluas luasnya ruang bagi mereka, kita sifatnya tematis, sesuai dengan sasaran. Tidak hanya secara formal yang diaturan saja seperti musyawarah desa dan sejenisnya, sehingga penggalian datanya lebih akurat.

Sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Desa Dermaji dalam melaksanakannya, khususnya pelayanan sosial?

Sejauh itu lah, hehe. Karena itu sudah menjadi program kita jadi harus mau tidak mau harus dilakukan. Tentunya kita tetap mengedepankan 3 hal penting yaitu; partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, cuma itu saja dan kita tingkatkan itu yang kemudian didukung dengan teknologi dan informasi

Apa saja faktor pendukung pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan lumir kabupaten banyuma ?

Faktor pendukung ya tentu tersedianya SDM, sarana prasarana.

Apa saja faktor penghambat pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan lumir kabupaten banyuma?

Merubah visi masyarakat, karena persoalan kesejahteraan tidak hanya soal infrastruktur melainkan kesehatan dan pendidikan atau yang lainnya sangat penting. Jadi disini yang menjadi tantangan bagaimana merubah pola pikir masyarakat itu sendiri.

Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **jaminan sosial**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Kalo untuk itu kita rasa tidak ada yah, karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, seperti BPJS, KIS dan itu semua menjadi persoalan perorang saja dengan pemerintah terkait. Kalo untuk jaminan sosial dari desa tidak ada, kita hanya memberikan layanan, layanan sosial dasar seperti yang dijelaskan tadi.

Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **kesehatan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Seperti yang saya sampaikan tadi diawal untul bentuk pelayanan dibidang kesehatan ini meliputi Posyandu, PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), Puskesmas Pembantu.

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **pendidikan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

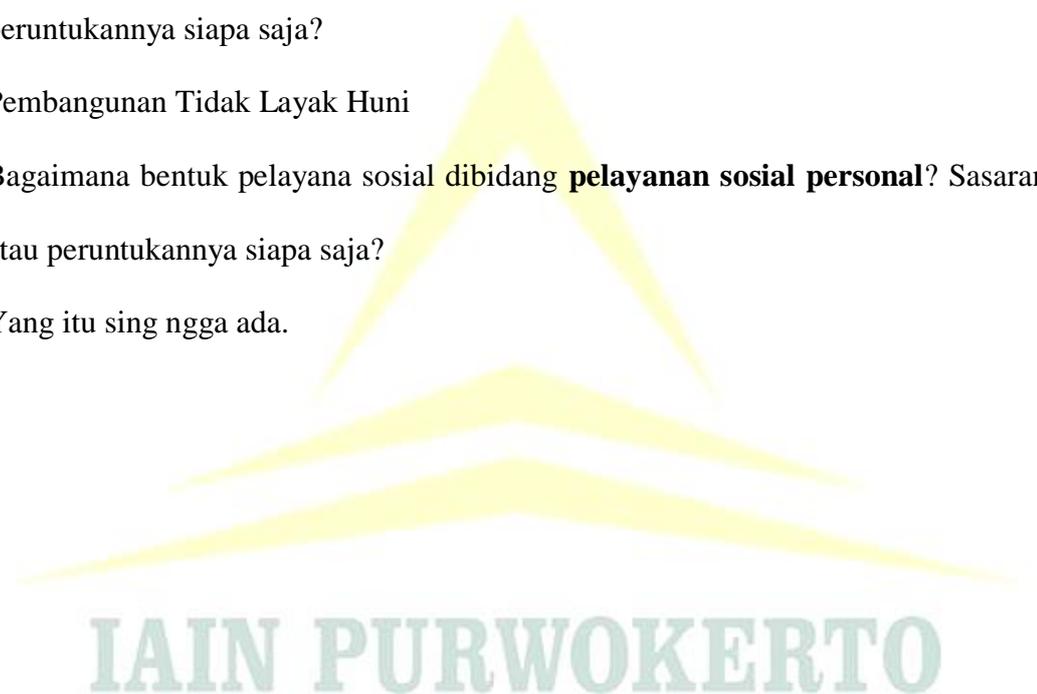
Pos paud,TK, Perpustakaan Desa, Musium Naladipa,

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **perumahan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Pembangunan Tidak Layak Huni

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **pelayanan sosial personal**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Yang itu sing ngga ada.



IAIN PURWOKERTO

Narasumber : Harry Haryono Caryono

Jabatan : Sekertaris Desa Dermaji

Script : wawancara

Seperti apa profil dan sejarah Desa Dermaji?

Saya rasa sama yah seperti yang tertera di website desa Dermaji, masnya tinggal mengaksesnya di www.dermaji.desa.id.

Apa program yang sudah terselenggara di Desa Dermaji terkait dengan kebijakan pemerintah Desa?

Untuk program pemdes sendiri sudah sangat banyak, seperti dibidang kesehatan, insfrastuktur, dan pendidikan. Itu semua menjadi kebijakan kami sebagai pemerintah desa Dermaji.

Apakah ada program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan Pelayanan Sosial?

Layanan sosial dasar menjadi salah satu kewajiban kami, namun lebih fokus terlaksana lewat lembaga yang ada seperti PKK Desa yang membawahi PKK RW yang masing- masing mempunyai posyandu balita, posyandu lansia. Jadi hal pelayanan kepada mesyarakat sudah terlaksana melalui kader- kader desa tersebut, kader- kader desa Dermaji termasuk luar biasa karena mereka mampu menjadi relawan yang aktif dalam membantu desa, mereka mampu melakukan pengarahan, bimbingan dan sosialisasi terkait kesehatan.

Desa juga sudah memberikan ruang yang luas kepada lembaga/ organisasi desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, seperti lembaga “paguyuban wong Dermaji”, kader- kadernya setiap tiga bulan memberikan santunan dan

memberikan pelayanan yang lainnya. Hal ini menjadi bukti kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat.

Adakah masalah sosial masyarakat Desa Dermaji ?

Masalah sosial di masyarakat desa Dermaji sebenarnya tidak begitu ada yah, seperti kenakalan remaja, narkoba, anak putus sekolah, itu semua terlihat dari survei kami dalam pencarian itu tadi tidak ada, lebih kepada tingkat kesehatan balita dan lansia itu tadi.

Tindakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa Dermaji Untuk Mengatasi masalah sosial tersebut?

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kami memberikan pelayanan sosial lebih kebidang kesehatan dan juga bidang pendidikan.

Bagaimana dengan persiapan dan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?

Membuat kader- kader seperti melalui FKD (Forum Kesehatan Desa) dibidang kesehatan, membentuk kelompok- kelompok yang dilegalitas oleh desa dengan adanya SK (surat keputusan) dari desa. Setelah itu kader- kader tersebut melaksanakan tugas- tugasnya berdasarkan bidang yang dibentuk.

Melakukan identifikasi masalah misal dibidang kesehatan lansia yang kemudian disitu ada program cek kesehatan gratis dari desa, semua proses pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga yang terkait.

Apa saja faktor yang mendukung pelayanan sosial?

Faktor pendukungnya mungkin mulai dari kesiapan relawan, kemudian adanya ruang untuk mewadahi, dan untuk kegiatannya kami anggarkan melalui APBDes.

Apa tujuan dari pelayanan sosial?

Agar seluruh lapisan masyarakat mengerti betul tentang pelayanan sosial itu seperti apa, dan mereka lebih tau apa hak yang mesti mereka dapatkan dari pemerintah Desa, sehingga ketika mereka (masyarakat) menemukan masalah di luar mampu melaporkan dan masyarakat bisa cermat dalam menerima pelayanan tersebut.

Apa bentuk- bentuk Pelayanan Sosial yang diselenggarakan di Desa Dermaji ?

Bentuk bentuk pelayanan sosial yang kami lakukan dikelompokkan kedalam layanan sosial dasar, yaitu air bersih, perpustakaan Desa, musium naladipa.

Jika dikelompokkan kebidang- bidangnya, kesehatan tadi ada; cek kesehatan gratis melalui posyandu, air bersih yang dikelola oleh BUMDes, sosialisasi dan pendampingan tentang kesehatan melalui PKK. Kemudian bidang pendidikan, ada Pos Paud, TK, perpustakaan Desa, dan musium naladipa. Di bidang ekonomi juga kita melaksanakan pelatihan pembudidayaan ikan, yang tujuannya lebih ke peningkatan swasembada pangan masyarakat, kita memakai bioflog fasilitas gratis dari desa untuk masyarakat, kendalanya karena kita di daerah ketinggian kalau musim seperti ini airnya susah, tapi setidaknya ini menjadi langkah kami untuk memberikan pelayanan peningkatan kapasitas SDM terkait UMKM yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dibidang kebudayaan juga kami memberikan ruang kepada kelompok budaya untuk melastarikan kebudayaan ini.

Apa saja strategi yang digunakan dalam pelayanan sosial?

Pertama memetakan informasi yang ada di desa terkait bidang- bidang tadi, yang kedua kita kuatkan organisasi yang ada di desa, yang ketiga kita berikan pelatihan

peningkatan kapasitas kader- kader yang berkaitan, dan yang selanjutnya yang paling utama kita masukan kegiatan/ program itu ke anggaran desa/ APBDes karena setiap kegiatan tanpa adanya anggaran tidak mungkin terlaksana.

Apakah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial terdapat kendala?

Kendalanya ada di pencarian kader yang memiliki kriteria yang sesuai dengan yang dicari. Semisal dalam pemberian pelatihan- pelatihan dan pencarian pemateri ini susah untuk didapat.

Adakah kerjasama- kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya dalam proses pelayanan sosial tersebut?

Ada, tetapi tidak terlalu sering juga, lebih ke lembaga pemerintahan yang lebih tinggi, juga ke kampus- kampus seperti UNSOED, karena kepala desa kita kenal dengan mereka dan orang- orang pemerintahan. Untuk LSM kita menggabung Gedhe Foundation karena kepala desa kita juga ada didalamnya, tapi itu dulu dan sekarang lebih ke instansi pemerintahan dan instansi pendidikan.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?

Sangat baik, apalagi dari kader ibu- ibu pkk dalam pelaksanaan pelayanan, dan responnya sangat luar biasa.

Sejauh mana tingkat keberhasilan program pemerintah Desa Dermaji dalam melaksanakannya, khususnya pelayanan sosial?

Dilihat dari responsive masyarakat itu sendiri kita rasa keberhasilan program pemerintah desa bisa dikatakan baik.

Apa saja faktor pendukung pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ?

Faktor pendukung di desa tentu kepala desa karena merupakan sebagai figur akhir untuk menyelesaikan masalah, menerima aduan masyarakat dan sebagai leader dalam menetapkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan sosial.

Apa saja faktor penghambat pelayanan sosial di pemerintah desa dermaji kecamatan lumbir kabupaten banyuma?

Kalau penghambat menurut saya tidak terlalu, hambatannya menurut saya mungkin di anggaran yang belum menjangkau ke semua aspek dari program pelayanan sosial.

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **jaminan sosial**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Kita mengikuti kepemerintah pusat, karena desa tidak berwenang dibidang jaminan sosial, kita hanya ebatas pengusulan kepada pemerintah daerah/ pusat, jadi di desa tidak ada.

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **kesehatan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Air bersih, bang sampah, Desa siaga, posyandu balita, posyandu lansia. Poliklinik kesehatan Desa/ PKD.

Bagaimana bentuk pelayana sosial dibidang **pendidikan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Perpustakaan Desa, Musium naladipa, POS PAUD, TK. Taman Pendidikan Qur'an/ TPQ.

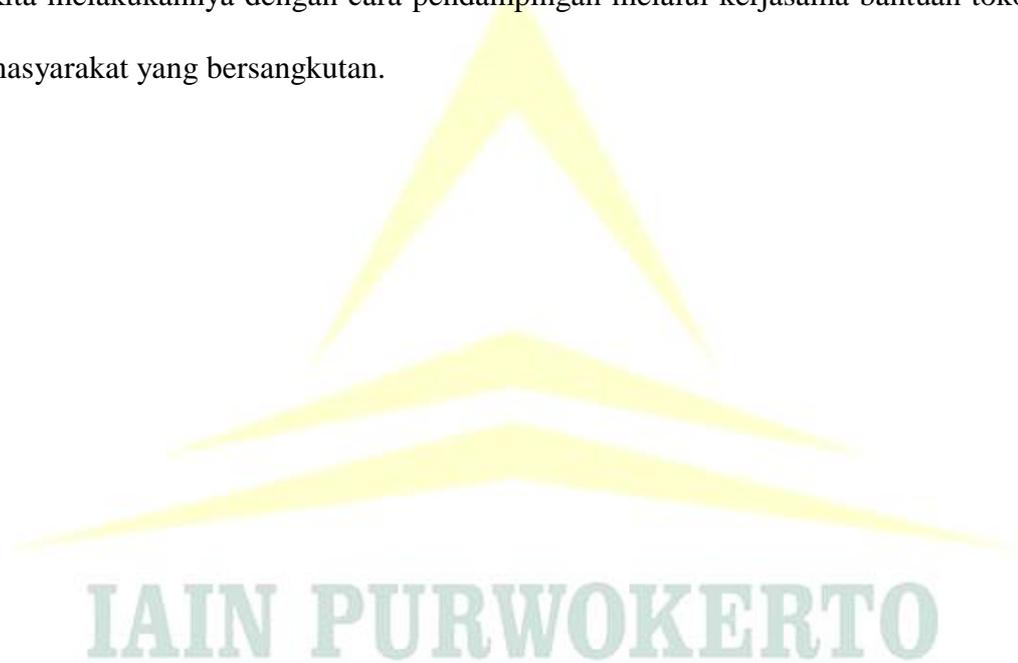
Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **perumahan**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Renovasi rumah tidak layak huni/RTLH milik masyarakat.

Bagaimana bentuk pelayanan sosial dibidang **pelayanan sosial personal**? Sasaran atau peruntukannya siapa saja?

Untuk personal kita berikan pelayanan tertentu sesuai dengan objeknya, seperti masyarakat- masyarakat yang memiliki perilaku yang kurang nyaman di lingkungan.

Kita melakukannya dengan cara pendampingan melalui kerjasama bantuan tokoh masyarakat yang bersangkutan.



Narasumber : Bapak Slamet

Jabatan : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Bagaimana kinerja PemDes Dermaji dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi masyarakatnya dikaca BPD?

Iyah,, menurut saya sebagai mitra kerja daripada Pemerintah Desa pelayanan sosial Pemerintah Desa ini sudah cukup baik, artinya apa- apa yang sudah di bahas pada MusrenbangDes sebagian besar sudah terlayani baik fisik ataupun non fisik.

Bagaimana keterlibatan antara BPD dengan Pelayanan Sosial di Desa Dermaji?

Terus disamping itu kami terlibat sebagai fungsi legalitas, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap kinerja jalannya pemerintahan desa, setiap ada program dan momen- momen dari desa kami selalu diikutsertakan.

Ikut merencanakan sebuah rencana program yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan itu, kemudian kita mengawal bagaimana program itu dilaksanakan atau tidak otomatis disitu fungsi pengawasannya, kemudian kami menggali setiap informasi- informasi usulan masyarakat keinginan masyarakat dalam hal sosial masyarakat kemudian kami tampung dan di sampaikan ketika didalam musyawarah, jadi keterlibatann BPD mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan pelayanan.

Contoh air bersih, dulu yang pertama tahun 2000 itu adalah dari proyek namanya PPPK ganti menjadi PNPM di wilayah “karangjambu” lokasinya di RW 3, sekarang kalo gak salah PAMSIMAS apa yah... kita mengawal semua itu.

Kemudian sekarang dibuat kaya PDAM oleh BUMDes, yang menjadi memperingan masyarakat warga.

Contoh Renovasi rumah tidak layak huni, ini sudah beberapa rumah yang sudah direnovasi, selain dari Dinas Sosial, APBDes ada sumber dana dari PWD (Paguyuban Wong Dermaji) pengururnya sekarang di Jakarta.

Untuk perpustakaan dan museum itu termasuk salah satu pelayanan bagi masyarakat agar dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat.



Narasumber : Ibu Karsinem

Jabatan : Bendahara PKK Desa

Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dibidang Pendidikan?

Kami sebagai pegiat PKK memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan yaitu pos Paud yang terdiri dari 7 Pos Paud, kebetulan kami menjadi tenaga pengajar di pos paud “Larasati RW 03 Desa Dermaji”.

Kalo untuk satu kecamatan ada 24 pos paud dan terhimpun dalam HIMPAUDI atau himpunan paud, untuk didesa dermaji ada di RW 1 pos paud Rahayu, RW 2 pos paud Sri Rejeki, RW 3 pos paud Larasati, RW 4 RW5 saya lupa namanya hhehe, pos paud Tunas Harapan RW 6 kalo engga salah, terus RW 7 pos paud Mekarsari.

Pembentukannya serentak di tahun 2009, untuk tenaga pengajar setiap pos paud ada yang 4 ada yang 5 guru, untuk kegiatan mengajar dimulai dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10, kalo untuk hari ada yang senin sampai jumat, ada juga yang sampai kamis. Kebetulan di pos paud “Larasati RW 03 Desa Dermaji” ada 14 siswa yang usianya 4 tahun, ada satu yang usianya 3 tahun.

Bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dibidang Kesehatan?

Iyah untuk kesehatan paling kita ikut kegiatan- kegiatan posyandu di desa dermaji ada 7 posyandu, ada imunisasi balita, ada sosialisasi kesehatan gizi, ada penyuluhan *stunting* yang kemarin itu pake alat pengukuran/ pencarian anak *stunting* dan kegiatan itu biasanya setiap satu bulan sekali terus ada yang tiga bulan sekali.

Narasumber : Ibu Maisaroh, S.Pd.

Jabatan : Masyarakat Desa Dermaji

Apakah anda asli pribumi Desa Dermaji ?

Iyah betul sekali, saya pribumi kelahiran 1993.

Apa aktifitas sehari-hari yang anda lakukan?

Sebelum menjadi ibu rumah tangga, saya pernah bakti di SD Lumbir selama 2-3 tahunan.

Apa yang anda ketahui tentang Pemerintahan Desa Dermaji?

Kepala Desa Dermaji adalah Bapak Bayu, beliau menjabat sudah tiga periode ini, dari tahun 2009, dan Sekertaris Desanya adalah bapak Caryono. Untuk kebijakan dan pelayanannya kepada masyarakat sangat baik, terbukti beliau bapak Bayu bisa terpilih lagi.

Bagaimana dengan proses pelayanan sosial di Desa Dermaji?

Pemerintah Desa Dermaji sangat terbuka dan, terlebih dalam menyampaikan APBDDes, setiap gang dan hamper setiap RW pasti ada papan pembereritaan tertakit Anggaran belanja Desa. Untuk proses pelayanannya tentu sangat baik dalam mengayomi mendukung dan menjaga masyarakatnya.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menerima Pelayanan Sosial dari Pemerintah Desa?

Pasti setiap ada rapat Desa masyarakat dilibatkan, terkhusus buat para pengurus organisasi di Desa, seperti RT, RW, PKK dan lainnya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayu Setyo Nugroho, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Kepala Desa Dermaji

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin

NIM : 1522104019

Smt / Prodi : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Benar-benar melakukan wawancara pengambilan data terkait dengan tugas akhir peneliti yang berjudul "Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dermaji 10 September 2019

Hormat saya,


(Bayu Setyo Nugroho)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harry Haryono Caryono, A.Md

Jabatan : Sekeraris Desa Dermaji

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin

NIM : 1522104019

Smt / Prodi : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Benar-benar melakukan wawancara pengambilan data terkait dengan tugas akhir peneliti yang berjudul "Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dermaji 10 September 2019

Hormat saya,



(Harry Haryono :C.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Slamet
Jabatan : Ketua BPD

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin
NIM : 1522104019
Smt / Prodi : IX / Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Benar-benar melakukan wawancara pengambilan data terkait dengan tugas akhir peneliti yang berjudul "Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dermaji, 23 September 2019

Hormat saya,


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karsineu

Jabatan : Bendahara

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin

NIM : 1522104019

Smt / Prodi : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

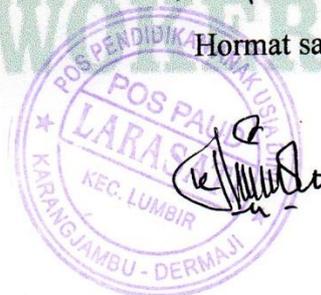
Fakultas : Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Benar-benar melakukan wawancara pengambilan data terkait dengan tugas akhir peneliti yang berjudul "Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

23, September 2019

Hormat saya,



(Karsineu.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maisaroh Spd-1
Jabatan : Warga Masyarakat
Menerangkanbahwa :

Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin

NIM : 1522104019

Smt / Prodi : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Benar-benar melakukan wawancara pengambilan data terkait dengan tugas akhir peneliti yang berjudul "Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dermaji 10 September 2019

Hormat saya,



(..... Maisaroh)

DOKUMENTASI

A.Wawancara



OKERTO

B. Kegiatan



C. Sarana Prasarana





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 1651 /In.17/FD.J.PM /PP. 00.9/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Nawawi, M.Hum
2. NIP : 19710508-199803 1 003
3. Pangkat/ Golongan/ Ruang : Lektor Kepala (IV/c)
4. Jabatan : Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat
5. Pada Sekolah : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : Fadlurrahman Azmi Amirudin
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 5 November 1996
3. Semester/ Prodi : VII/PMI
4. Nomor Induk Mahasiswa : 1522104019
5. Jurusan : Pengembangan Masyarakat
6. Tahun Akademik : 2018-2019

benar-benar telah mengajukan proposal skripsi dengan judul: Upaya Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Sosial bagi Masyarakat (Studi Kasus Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas) dengan dosen pembimbing : Nur Azizah, M.Si.

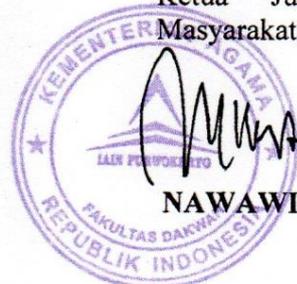
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto

Pada Tanggal : 31 Desember 2018

Ketua Jurusan Pengembangan

Masyarakat,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: www.iainpurwokerto.ac.id



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 8108640599

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3419 /In.17/FD.J.PM/PP.009/IX/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat menerangkan bahwa :

Nama : FADHLURRAHMAN AZMI A.
NIM : 1522104019
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian Komprehensif pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 September 2019

Ketua Jurusan,



AGUS SRIYANTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

Nomor : 3364/In.17/FD.J.PM/PP.009/II/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 2 September 2019

Kepada Yth. :
Kepala Desa Dermaji
di
Lumbir

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : FADHLURRAHMAN AZMI A.
2. NIM : 1522104019
3. Semester : 9
4. Jurusan / Prodi : Pengembangan Masyarakat/Pengembangan Masyarakat Islam
5. Alamat : Desa Pekuncen Rt 003/ Rw 002 Kec. Jatilawang Kode Pos. 53174 Kab. Banyumas
6. Judul : PELAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DESA DERMAJI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pemerintah Desa Dan Masyarakat
2. Tempat/Lokasi : Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
3. Tanggal Riset : 6 September 2019 sd. 6 November 2019
4. Metode Penelitian : Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Bapak/Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Ketua Jurusan,

AGUS SRIYANTO



**PEMERINTAH DESA DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA**

Alamat Kantor : Jalan Raya Dermaji No. 5, Kode Pos 53177
Website : www.dermaji.desa.id E-mail : pemdesdermaji@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2/102/X/2019

Berdasarkan Surat Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Nomor :
3364/In.17/FD.J.PM/PP.009/II/2019, Perihal Permohonan Ijin Riset Individual,
Pemerintah Desa Dermaji menerangkan bahwa :

Nama : Fadhlurrahman Azmi Amirudin
NIM : 1522104019
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Tahun Akademik : 2015
Maksud Tujuan : Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian : Pelayanan Sosial Pemerintah Desa Dermaji Kec. Lumbir
Kabupaten Banyumas

Telah melaksanakan penelitian pada pelayanan sosial Pemerintah Desa Dermaji
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dermaji, 07 Oktober 2019


Kepala Desa Dermaji
BAYU SETYO NUGROHO, S.Sos.,M.Si

Mengetahui :


Sekretaris Desa Dermaji
HARRY HARYONO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fadhlurrahman 'Azmi Amirudin
2. NIM : 1522104019
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 05 November 1996
4. Alamat : Desa Pekuncen Rt 03/ Rw 02,
Kecamatan Jatilawang,
Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Arlam
6. Nama Ibu : Nur Rokhmah

B. Riwayat Pendidikan

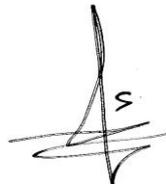
1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : RA Diponogoro 147 Wangon, 2002
- b. SD/ MI, tahun lulus : SD N 01 Pekuncen, 2009
- c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 01 Jatilawang, 2012
- d. SMA/ MA, tahun lulus : SMK AL- HIKMAH 01 Brebes, 2015
- e. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2015

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al- Mutta'abbidin Tinggarjaya, jatilawang
- b. Pondok Pesantren Al- Hikmah 01 Benda, Sirampog, Brebes
- c. Pondok Pesantren Al- Ittihad Pasir Kidul, Purwokerto Barat
- d. Latihan Kader PMII komisariat Walisongo, Purwokerto

Jatilawang, 5 Oktober 2019



Fadhlurrahman 'Azmi A